BRAWIJAY

ANALISIS PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DI KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun oleh:

AHMAD BASIS HIDAYATULLAH NIM. 135030607111004



Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Siswidiyanto, MS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2018

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ عَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar"

QS. Al-Baqarah: 153

"Pada impian yang telah terbentuk itu Kita tidak boleh berpuas diri"

JKT48 - Scrap and Build

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya Mulyaningsih Sri Andayani dan ayah saya Hartono yang selalu memberikan doa terbaiknya, dukungan moral serta kasih sayang yang tiada henti dalam keadaan apapun hingga saya sampai pada titik saat ini.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

: Analisis Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di

Kabupaten Jombang

Disusun oleh : Ahmad Basis Hidayatullah

NIM

: 135030607111004

Fakultas

: Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan

: Administrasi Publik

Minat

: Perencanaan Pembangunan

Malang, 1 November 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Siswidiyanto, MS

NIP. 19600717 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

: Jum'at

Tanggal

: 20 Desember 2018

Jam

: 09.00 - 10.00 WIB

Skripsi atas nama

: Ahmad Basis Hidayatullah

Judul Skripsi

: Analisis Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

di Kabupaten Jombang

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

<u>Dr. Siswidiyanto, MS</u> NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota

Anggota

Akhmad Amirudin, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc

NIP. 19870426 201504 1 005

Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA

NIP. 2011078504211000

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini yang berjudul Analisis Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 12 Desember 2018

41874A, F7 5187246 6000 DUP

METERAL 1/4

Ahmad Basis Hidayatullah NIM. 135030607111004

RINGKASAN

Ahmad Basis Hidayatullah, 2018. **Analisis Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang**. Dosen pembimbing: Dr. Drs. Siswidiyanto, MS. hal. 150 + xvi

Adanya kebijakan desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk dapat mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat yang hanya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) menjadi salah satu terobosan bagi pemerintah daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta untuk pengembangan sumber daya manusia. Salah satu daerah di Indonesia yang sedang menerapkan program PBKL adalah Kabupaten Jombang di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan potensi keunggulan lokal apa saja yang di miliki oleh Kabupaten Jombang dan menganalisa program pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient (LQ)* untuk mengetahui potensi keunggulan lokal serta model interaktif Miles, Huberman dan Saldana untuk menganalisa data dari program PBKL di Kabupaten Jombang.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa program pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang terjadi kesalah pemahaman konsep sesungguhnya mengenai keunggulan lokal oleh pemerintah daerah sendiri. Kabupaten Jombang menyebutkan bahwa program "Jombang Agamis" sebagai program PBKL yang di dalamnya mencakup kegiatan seperti sholat, membaca dan menghafal ayat Al-Qur'an serta doa sehari-hari. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep pendidikan berbasis keunggulan lokal yang penerepannya perlu mempertimbangkan 3 aspek penting yaitu: aset daerah, ciri khas daerah, dan kebutuhan daerah. Kemudian, secara umum keunggulan daerah itu mencakup: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi geografis. Hasil analisis menunjukan bahwa potensi keunggulan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang terdapat di bidang pertanian, lebih tepatnya pada sektor tanaman pangan dan perkebunan yaitu komoditas padi, jagung, dan tebu. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui suatu program keahlian kompetensi di sekolah-sekolah untuk dapat mewujudkan kondisi yang ideal dalam pengembangan program PBKL di Kabupaten Jombang.

Kata kunci: program pendidikan, keunggulan lokal

SUMMARY

Ahmad Basis Hidayatullah, 2018. **Analysis of Local Excellence Based Education Programs in Jombang Regency**. Supervisor: Dr. Drs. Siswidiyanto, MS. page. 150 + xvi

The existence of a decentralization policy makes local governments have full authority to be able to take care of their own regions without interference from the central government which only supervises and evaluates the implementation of policies planned and implemented by the regional government. Local excellence-based education program (*PBKL*) has become one of the breakthroughs for local governments to achieve community welfare, increase regional economic competitiveness, and to develop human resources. One of the regions in Indonesia that is implementing the local excellence-based education program is Jombang Regency in East Java. This study aims to explain what local potential advantages possessed by Jombang Regency and analyze local excellence-based education programs in Jombang Regency.

This research is a qualitative descriptive study. The location of this research is in Jombang Regency. Data collection techniques are carried out using documentation, interviews and observation methods. The instrument used is the researcher himself, interview guidelines, notebooks, recording devices and cameras. Analysis of the data used in this study uses the Location Quotient (LQ) analysis method to determine the potential of local excellence as well as interactive models of Miles, Huberman and Saldana to analyze data from the local excellence-based education program in Jombang Regency.

The results of the study explain that a local excellence-based education program in Jombang Regency is a misunderstanding of the real concept of local excellence by the local government itself. Jombang Regency states that the program "Jombang Agamis" is a local excellence-based education program which includes activities such as prayer, reading and memorizing verses of Al-Quran and daily prayers. This is certainly not in accordance with the concept of education based on local excellence whose future needs to consider three important aspects, namely: regional assets, regional characteristics, and regional needs. Then, in general the regional superiority includes: natural resources, human resources, and geographical potential. The results of the analysis show that the potential of local excellence owned by Jombang Regency is in the field of agriculture, more precisely in the food and plantation sector, namely rice, corn and sugarcane. This potential can be developed through a competency expertise program in schools to realize ideal conditions in the development of local excellence-based education programs in Jombang Regency.

Keywords: Education programs, Local excellence

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa belajarnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- 3. Bapak Dr. Drs. Siswidiyanto, MS selaku pembimbing yang telah melungkan waktu dan memberikan masukan serta arahannya untuk skripki penulis dengan sabar disaat membimbing.
- 4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi
 Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.

- 6. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang atas bantuan dan kerjasamanya dalam pemberian informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan tema skripsi yang penulis ambil.
- 7. Seluruh narasumber yang telah membantu dan melancarkan peneliti dalam memberikan informasi yang terkait dengan tema skripsi yang penulis ambil.
- 8. Bapak dan ibu, yang sangat-sangat sabar memberikan nasehat, semangat dan doanya.
- 9. Kepada seluruh teman-teman Kandang yang ikut menyaksikan perjuangan saya sejak menginjak Kota Malang, atas kebersamaan, doa dan dukungannya.
- Ananda Putri Nurmalita Firdaus yang menemani dan selalu memberi dorongan, semangat, kesabaran, motivasi serta dukungan demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
- 11. Seluruh teman-teman FIA angkatan 2013, teman-teman Jurusan Administrasi Publik angkatan 2013, teman-teman Development Planning angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini dan bantuan yang berarti bagi penulis.
- 12. Riskha Fairunissa yang memberi semangat serta tangis dan tawa dalam perjalanan saya selama ini.
- 13. Teman-teman wota Malang-Surabaya-Jakarta yang selalu memberikan pencerahan serta candaan dan menjadi hiburan tersendiri dikala penulis merasa jenuh.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL | i |
|--|-------|
| MOTTO | ii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| TANDA PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| RINGKASAN | vii |
| SUMMARY | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Administrasi Publik | |
| 1. Definisi Administrasi Publik | 13 |
| 2. Administrasi Pembangunan | 15 |
| B. Perencanaan Pembangunan | |
| 1. Definisi Perencanaan Pembangunan | 16 |
| 2. Unsur-Unsur Perencanaan Pembangunan | 17 |
| 3. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan | |
| C. Otonomi Daerah | |
| 1. Konsep Dasar | 22 |
| 2. Visi Otonomi Daerah | 25 |

| | 3. Landasan Hukum | 27 |
|--|--|---|
| | 4. Ukuran-Ukuran Otonomi Daerah | 27 |
| | 5. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah | 28 |
| | 6. Tujuan Otonomi Daerah | |
| D. | • | |
| | 1. Konsep Dasar | 31 |
| | 2. Tujuan Pendidikan | |
| | 3. Fungsi Pendidikan | |
| | 4. Mutu dan Kualitas Pendidikan | |
| | 5. Indikator Pendidikan | 34 |
| E. | Kebijakan Pendidikan | |
| | 1. Definisi Kebijakan Pendidikan | 36 |
| | 2. Makna Kebijakan Publik dalam Pendidikan | |
| | 3. Perlunya Kebijakan Pendidikan | |
| | 4. Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan | |
| F. | · · | |
| | 1. Konsep Dasar | 42 |
| | 2. Potensi Keunggulan Lokal | |
| | 3. Tujuan PBKL | |
| | 4. Landasan PBKL | 47 |
| | 5. Ruang Lingkup PBKL | |
| | 6. Langkah Pengembangan PBKL | |
| | 7. Pihak yang Terlibat | |
| | 8. Rambu-Rambu PBKL | |
| | | |
| | | |
| | | |
| BAB III M | ETODE PENELITIAN | |
| | ETODE PENELITIAN | 55 |
| A. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian | |
| A. B. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian | 56 |
| A. B. C. | ETODE PENELITIAN Jenis PenelitianFokus PenelitianLokasi Penelitian | 56 |
| A. B. C. D. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian | 56 58 |
| A. B. C. D. E. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data | 56 58 59 |
| A. B. C. D. E. F. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian | 56 58 59 60 |
| A. B. C. D. E. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data | 56 58 60 63 |
| A. B. C. D. E. F. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian | 56 58 69 63 64 |
| A. B. C. D. E. F. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman | 56 58 60 63 64 64 |
| A. B. C. D. E. F. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman | 56 58 60 63 64 64 |
| A. B. C. D. E. F. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman | 56 58 60 63 64 64 |
| A. B. C. D. E. F. G. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian | 56 58 60 63 64 64 |
| A. B. C. D. E. F. G. | FODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian | 56 58 60 63 64 64 |
| A. B. C. D. E. F. G. | FODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jombang | 56 58 60 63 64 64 65 |
| A. B. C. D. E. F. G. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jombang 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jomban | 56 58 60 64 64 65 70 |
| A. B. C. D. E. F. G. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jombang 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jomban 2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang | 56 58 60 64 64 65 70 |
| A. B. C. D. E. F. G. | Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jombang 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jomban 2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang 3. Kondisi Fisik Geografis | 56 58 60 64 64 65 70 g74 78 |
| A. B. C. D. E. F. G. | ETODE PENELITIAN Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian Teknik Analisis Data 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jombang 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jomban 2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang 3. Kondisi Fisik Geografis 4. Penggunaan Lahan | 56 58 59 60 64 64 65 70 g74 78 78 |
| A. B. C. D. E. F. G. H. BAB IV H. A. | Jenis Penelitian Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 1. Metode Location Quotient (LQ) 2. Analisis Data Miles & Huberman Keabsahan Data Penelitian ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jombang 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jomban 2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang 3. Kondisi Fisik Geografis | 56 58 59 60 64 64 65 70 g74 78 78 |

| 1. | visi dan wiisi Pendidikan di Kabupaten Johnbang | |
|--------------------|--|-------|
| 2. | Tujuan dan Sasaran Pendidikan Kabupaten Jombang | |
| 3. | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 95 |
| 4. | Arah Kebijakan dan Strategi | 94 |
| C. Per | nyajian Data Penelitian | |
| 1. | Potensi Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang | 100 |
| | a) Potensi Sektor Pertanian | 100 |
| | 1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan | 102 |
| | 2) Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan Kehutana | n 103 |
| | 3) Sub Sektor Peternakan | 104 |
| | b) Potensi Sektor Industri | 106 |
| 2. | Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | |
| | dalam Program PBKL | 109 |
| 3. | Kebijakan Pemerintah Maupun Pemerintah Daerah | |
| | Mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal | 111 |
| 4. | Sumber Daya yang Mendukung Terlaksananya | |
| | Program PBKL di Kabupaten Jombang | 114 |
| | a) Sumber Pembiayaan atau Anggaran Program PBK | L |
| | di Kabupaten Jombang | 114 |
| | b) Pelaku atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang | |
| | Mendukung Program PBKL di Kabupaten Jomban | g 115 |
| | c) Ketersediaan Fasilitas Penunjang dalam Pelaksana | an |
| | Program PBKL di Kabupaten Jombang | 120 |
| D. An | alisis Data Penelitian | |
| 1. | Analisis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang | |
| | Menggunakan Metode Location Quotient (LQ) | 123 |
| 2. | Analisis Program Pendidikan Berbasis | |
| | Keunggulan Lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang | 132 |
| | | |
| | | |
| BAB V PENUT | UP STATE OF THE ST | |
| A 17.00 | innular K Kill K | 120 |
| | simpulan | |
| B. Sar | an | 141 |
| | | |
| DAEWAR BUCK | ГАКА | 1 40 |
| | | |
| LAMPIRAN | | 146 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 1. Data Produksi Sektor Pertanian, Perkebunan, |
|---|
| dan Kehutanan Kabupaten Jombang Tahun 20168 |
| Tabel 2. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan |
| · · |
| Batas Adiministratif Kabupaten Jombang77 |
| Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut |
| Kelompok Umur Tahun 201685 |
| Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut |
| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan |
| Usaha Utama Selama Seminggu yang Lalu di |
| Kabupaten Jombang 201686 |
| Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja |
| Selama Seminggu Menurut Lapangan Usaha Utama dan |
| Jenis Kalamin di Kabupaten Jombang 201687 |
| Tabel 6. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang91 |
| Tabel 7. Kebijakan dan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang97 |
| Tabel 8. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan di |
| Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016102 |
| Tabel 9. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan |
| di Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016104 |
| Tabel 10. Perkembangan Produksi Peternakan di |
| Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016105 |
| Tabel 11. Anggaran Kurikulum Jombang Agamis Tahun 2016 115 |
| Tabel 12. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016 |
| Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang116 |
| Tabel 13. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) |
| Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016118 |
| Tabel 14. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan |
| Menengah di Kabupaten Jombang Menurut Kecamatan |
| Tahun 2016119 |

| Tabel 15. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di | |
|--|-----|
| Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016 | 121 |
| Tabel 16. Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Sub Sektor | |
| Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Jombang | |
| Tahun 2014-2016 | 125 |
| Tabel 17. Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Sub Sektor | |
| Tanaman Perkebunan Kabupaten Jombang | |
| Tahun 2014-2016 | 126 |
| Tabel 18. Analisis Location Quotient (LQ) Komoditas Sub Sektor | |
| Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016 | 127 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1. Paradigma Berpikir tentang Konsep Keunggulan Lokal | 7 |
|--|-----|
| Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif | 67 |
| Gambar 3. Peta Geografis Kabupaten Jombang | 75 |
| Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan | |
| Kabupaten Jombang 2014-2018 | 81 |
| Gambar 5. Kondisi Budaya Kerja Masyarakat Kabupaten Jombang | |
| di Bidang Pertanian | 89 |
| Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan | |
| Kabupaten Jombang 2014-2018 | 96 |
| Gambar 7. Kondisi Potensi Pertanian Kabupaten Jombang | |
| Ditinjau dari PDRB-HB. | 101 |
| Gambar 8. Kondisi Industri Olahan Kabupaten Jombang | 107 |
| Gambar 9. Kondisi Masyarakat Kabupaten Jombang di | |
| Bidang Industri Kerajinan Rakyat | 109 |
| Gambar 10. Foto Peta Potensi Komoditas Keunggulan Lokal di | |
| Kabupaten Jombang Tiap Kecamatan | 131 |
| | |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1. Pedoman Wawancara | 47 |
|---|----|
| Lampiran 2. Surat Pengantar Penelitian dari Dinas Penanaman Modal | |
| dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang14 | 48 |
| Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan | |
| Kabupaten Jombang14 | 49 |
| Lampiran 4. Curriculum Vitae | 50 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi merupakan titik tolak perubahan kebijakan desentralisasi di Indonesia kearah nyata. Artinya bahwa reformasi memberikan hikmah sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah yang sesungguhnya. Pelaksanaan otonomi daerah pada masa sebelum reformasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dianggap sebagai konsep otonomi yang syarat dengan nuansa sentralistik karena pemerintah pusat pada saat itu enggan untuk mendelegasikan kewenangannya ke daerah, sehingga dampak yang timbul adalah kurangnya keberdayaan pemerintah daerah dalam merespon dinamika dan permasalahan yang terjadi di daerah.

Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah sebagai akibat dari terbatasnya wewenang pemerintah daerah dalam mengambil keputusan penting. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang pemerintah dan masyarakat di daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam hal pelimpahan wewenang atau dikenal dengan istilah desentralisasi ini, pemerintah pusat hanya melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut.

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen utama untuk mencapai suatu negara yang mampu menghadapi tantangan-tantangan

tersebut serta membawa konsekuensi dan implikasi yang cukup besar terhadap perubahan paradigma pembangunan daerah. Daerah dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di sebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai 3 tugas pokok yaitu: (1) memberdayakan dan menitikberatkan pada penciptaan ruang bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam setiap proses pemerintahan dan pembangunan, (2) menciptakan pemerintahan daerah yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel dalam mengelola sumber daya daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 3 tujuan utama dari desentralisasi adalah meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menigkatkan daya saing daerah. Salah satu kebijakan guna mencapai tujuan tersebut adalah melalui program pendidikan.

Bagaimanapun pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi, sosial budaya dan pengolahan sumber daya alam (SDA). Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu fungsi utama dari adanya program pendidikan adalah mampu membebaskan masyarakat dari belenggu paling mendasar, yaitu ketidak tahuan, kelemahan, dan keterbelakangan. Melalui pendidikan diharapkan dapat memberikan pesan-pesan informasi keilmuan yang menjadikan masyarakat lebih mengerti, mengetahui, memahami, dan memiliki wawasan yang semakin luas. Pendidikan diharapkan mampu memberikan motivasi untuk bergerak maju yang memacu masyarakat untuk bangkit dari keterbelakangan, dan pendidikan juga mengungkapkan cara-cara atau strategi menjadi individu yang kuat sehingga mereka mampu berusaha mengatasi kelamahan-kelemahanya.

Pendidikan di Indonesia, diharapkan mampu membangun kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dengan mengembangkan berbagai potensi secara terpadu. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan:

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kamampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Proses pendidikan bukan hanya sesuatu yang terjadi di dalam bangku sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan manusia secara keseluruhan di dalam keluarga, di dalam masyarakat dan bernegara dengan berbagai aspek sosial politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Pendidikan dalam arti yang sebenarnya adalah segala bentuk interaksi manusia di dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Dengan demikian, penanggulangan krisis

bagi masyarakat Indonesia dewasa ini dan usaha reformasi kehidupan yang akan datang merupakan pola program yang sangat esensial dalam pengembangan sistem pendidikan nasional.

Salah satu terobosan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) yang dapat dilaksanakan oleh tiap daerah di Indonesia. Terobosan ini bertujuan menggugah kesadaran dan perhatian insan pendidikan dalam menggali dan mengembangkan keunggulan lokal yang terdapat pada tiap daerah yang bersumber dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), serta potensi geografis.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal ini diharapkan mampu membangkitkan potensi lokal yang selama ini cenderung dilupakan dan dianggap bukan suatu hal yang penting yang luput dari perhatian publik. hal ini menjadi isu aktual yang mendapat perhatian publik secara luas. Perubahan demi perubahan terus didorong oleh pemerintah untuk dapat mengembangkan sektor unggulan yang menjadi tumpuan bagi masyarakat. Perubahan yang paling mendasar terhadap semua aspek kehidupan bangsa Indonesia adalah adanya perubahan tata pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Dalam pemerintahan sentralistik, hampir semua kebijkan penting dan kendali pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten/kota hanya menjadi pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat. Saat ini, dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fungsi dan wewenang pemerintah daerah lebih besar dalam membuat kebijakan dan

BRAWIJAY

melaksanakannya sesuai dengan variasi potensi dan kepentingan pengembangan daerahnya masing-masing.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi tersebut, daerah dapat mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah dengan membuat program sekolah yang berbasis keunggulan lokal. Berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut sudah diatur bahwa pelaksanaan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan harus dilaksanakan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, sebagai salah satu substansi utama dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal diperlukan, terutama kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan.

Keunggulan suatu bangsa terkait dengan kemampuan daya saingnya dengan bangsa-bangsa lain. Daya saing mengacu pada kemampuan bersaing seseorang, kelompok, masyarakat, atau dengan bangsa lain. Dengan kata lain, daya saing berkaitan dengan nilai berkompetisi terhadap pesaingnya. Agar mampu berkompetisi, tentunya diperlukan keunggulan-keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun komparatif. Keunggulan komparatif terkait dengan sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Sedangkan, keunggulan kompetitif terkait dengan kemampuan suber daya manusia (SDM).

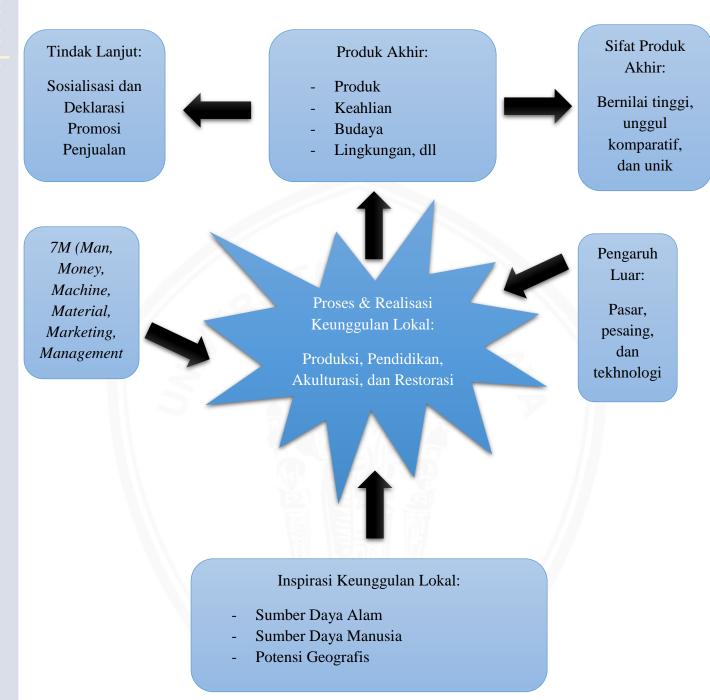
Potensi keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah, pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar masyarakat daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan paham betul tentang potensi dan nilai-nilai, serta budaya daerahnya sendiri. Sehingga masyarakat dapat mengembangkan dan mengolah potensi daerahnya sendiri sesuai dengan tuntutan jaman.

Secara umum keunggulan lokal diinspirasi oleh tiga potensi yaitu: (1) Sumber Daya Alam (SDA); (2) Sumber Daya Manusia (SDM); (3) potensi Geografis. Dari potensi tersebut dapat dilakukan proses dan realisasi program, di antaranya proses produksi, program akulturasi dan pembudayaan, program restorasi dan perawatan, program pendidikan dan pelatihan. Kualitas proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia yang selama ini lebih dikenal dengan istilah 7M, yaitu: *Man, Money, Machine, Material, Methods, Marketing, and Management.* Jika sumber daya yang dibutuhkan bisa dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut akan memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Disamping dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, proses dan realisasi keunggulan lokal juga harus memperhatikan kondisi pasar, para pesaing, substansi (barang pengganti) dan perkembangan iptek khususnya perkembangan teknologi. Proses dan realisasi tersebut akan menghasilkan produk akhir sebagai "Keunggulan Lokal" yang mungkin berwujud produk (barang/jasa) yang bernilai tinggi, memiliki keunggulan komparatif, dan unik yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya.

Untuk lebih mudah memahami tentang pengembangan potensi suatu daerah sehingga menjadi keunggulan lokal, dapat digunakan paradigma berpikir seperti tampak pada Gambar 1.1 berikut:





Gambar 1. Paradigma Berpikir tentang Konsep Keunggulan Lokal Sumber: Renstra BAPPEDA Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km². Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta), jalur Kediri-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban. Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi keunggulan lokal yang beragam. Potensi keunggulan lokal yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Jombang dapat diketahui dari produksi sumber daya alam melalui sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta peternakan. Berikut tabel produksi Kabupaten Jombang pada tahun 2016:

Tabel 1. Data Produksi Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2016

| 1 etci manan inabapaten combang i anan 2010 | | |
|---|---------|--------------|
| No. | Jenis | Produksi/Ton |
| 1. | Cengkeh | 774 |
| 2. | Kopi | 761 |
| 3. | Tebu | 49.227 |
| 4. | Jagung | 241.325 |
| 5. | Padi | 469.009 |

BRAWIJAYA

| No. | Jenis | Produksi/Ton |
|-----|-----------------------|--------------|
| 6. | Daging Sapi (Kg) | 3.854.400 |
| 7. | Telur Ayam Buras (Kg) | 961.559 |

Sumber: Data di olah dari BPS Kab. Jombang

Untuk dapat mengolah serta mengembangkan potensi keunggulan lokal yang dimiliki oleh daerah maka diperlukannya suatu program pendidikan yang dapat mendukung terbentuknya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi keahlian yang dapat mengembangkan potensi keunggulan lokal di Kabupaten Jomabang, Usaha tersebut diantaranya dilaksanakan melalui Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL).

Terjadinya kesalahpahaman konsep dari pendidikan keunggulan lokal oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang menyebabkan munculnya berbagai potensi masalah dalam pelaksanaan program Pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 4 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2016 Bab IX Pasal 18 Ayat 3 tentang penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa keunggulan lokal sebagaimana dimaksud adalah mata pelajaran keunggulan lokal keagamaan. Peraturan ini yang mendasari terbuatnya program kerja dari dinas pendidikan Kabupaten Jombang yang disebut program Jombang Agamis. Program tersebut tidak sesuai dengan konsep pendidikan berbasis keunggulan lokal yang harus mempertimbangkan potensi, keunggualan, dan kebutuhan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh daerah.

Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul "Analisis Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- 1. Apa saja potensi keunggulan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang?
- 2. Bagaimana program pemerintah daerah Kabupaten Jombang mengenai program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui potensi keunggulan lokal daerah Kabupaten Jombang yang dapat lebih dikembangkan lagi.
- Untuk menganalisa mengenai program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, hasil yang diharapkan adalah mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep peningkatan pendidikan, dengan cara pelibatan peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan agar pendidikan berjalan secara efektif, tepat sasaran dan hasilnya memiliki pengaruh yang positif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, masukan maupun landasan pemikiran terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan melalui program PBKL di Kabupaten Jombang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai arahan dan panduan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini. Penulisan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan standart dan prosedur penulisan yang telah diatur dalam buku pedoman skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

AWIIAYA

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh penulis yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan gambaran umum Kabupaten Jombang, potensi keunggulan lokal di Kabupaten Jombang, penyajian data-data yang dapat dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal yang tercantum dalam fokus penelitian, kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan atau analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkenaan dengan hasil analisis dalam fokus penelitian dan beberapa saran untuk proses peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan khususnya mengenai program pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrsi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Adminstrasi negara yang sekarang lebih dikenal dengan administrasi publik secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Sondang P. Siagian, 2003:7).

Administrasi merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan. Di dalam tingkat kehidupan administrasi lebih diintrepetasikan pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai obyek sasarannya.

Menurut Pasolong (2007) menerangkan bahwa administrasi publik adalah sebuah konsep yang menangani hubungan pemerintah terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. Sedangkan definisi administrasi publik menurut McCrudy dalam Keban (2008) administrasi publik dapat dilihat sebagai proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Chlander dan Plano dalam Keban (2008) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana

sumberdaya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Perkembangan evolusioner administrasi publik diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan, dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk ilmu administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.

Diantara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada suatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis.

Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan baahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara Lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yaitu tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jangkauan dari administrasi publik adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan suatu bangsa. Adapun pengertian dari administrasi publik adalah suatu kegiatan yang berupa kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu organisasi publik guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan bersama demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Secara lebih sederhana, pengertian administrasi publik di atas dapat ditarik garis besar bahwa pada intinya adminitrasi menyinggung beberapa hal berikut:

- a) Kerjasama
- b) Melibatkan dua orang atau lebih
- c) Untuk mencapai tujuan bersama.

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi, dan (2) pembangunan. Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

BRAWIJAY

Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan menjelaskan bahwa terdapat lima ide pokok mengenai definisi administrasi pembagunan, yaitu:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses yang merupakan rangkaina kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahaptahap yang bersifat tanpa akhir.
- b) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- c) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
- d) Rencana pembangunan mengandung makan pertumbuhan dan perubahan.
- e) Pembangunan mengarah pada modernitas.

Dari pembahasan diatas maka sampailah pada batasan pengertian atau definisi dari adminstrasi pembangunan, yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Perencanan Pembangunan

1. Definisi Perencanan Pembangunan

Suatu perencanaan memiliki peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan bersama suatu organisasi. Bahkan suatu program bisa ditebak tingkat

keberhasilannya dilihat dari baik tidaknya perencanaannya. Jika perencanaannya masih terdapat banyak kekurangan, maka dipastikan tujuan yang sudah ditetapkan tidak akan tercapai, begitu pula sebaiknya. Handoko (1999) mengatakan bahwa ada dua alasan dasar perlunya perencanaan, yaitu:

- a) Perencanaan dilakukan untuk mencapai *protective benefits* (manfaat perlindungan) yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
- b) Perencanaan dilakukan untuk mencapai *positive benefits* (manfaat positif) dalam bentuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi.

2. Unsur-Unsur Perencanan Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1989) mengatakan bahwa definisi dasar dari sebuah perencanaan yang mana diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 menjelaskan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Ardani dan Iswara dalam Soekartawi (1990) menjelaskan definisi perencanaan biasanya mengandung beberapa elemen, antara lain:

- a) Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif-alternatif.
- b) Perencanaan dapat diartikan sebagai pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia.

BRAWIJAY.

- c) Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya mencari sasaran
- d) Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai target sasaran yang dikaitkan dengan waktu masa depan. Menurut Tjokroamidjojo (1995) menjelaskan bahwasannya unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering juga disebut sebagai tujuan, arah, dan prioritas-prioritas pembangunan.
 - Kerangka rencana tersebut juga sebagai kerangka mikro rencana.
 Dalam kerangka ini dihubungkan sebagai variabel-variabel pembangunan (ekonomi) serta implikasi hubungan tersebut.
 - Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsur pokok dalam penyusunan pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan.
 - Kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai kebijaksanaan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan dan dalam sebuah pembangunan antara kebijaksanaan satu dengan lainnya perlu diserasikan dan dikonsistenkan.
- e) Program invetasi. Investasi dilakukan secara sektoral bersama dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana (*plan targets / development targets*). Dalam penyusunan program investasi dan sasaran-sasaran rencana perimbangan ekonomi dan pembangunan diserasikan dengan kemungkinan pembiayaan secara wajar.

f) Administrasi Pembangunan. Salah satu segi penting dalam proses perencanaan adalah pelaksanaan dan diperlukan administrasi yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsurunsur perencanaan pembangunan adalah hal-hal yang dijadikan dasar dan harus ada dalam suatu perencanaan pembangunan. Setiap unsur di dalam perencanaan pembangunan tentu saja memainkan peranan yang sangat penting, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tujuan dari sebuah perencanaan pembangunan tidak adak tercapai. Hal ini dikarenakan satu dengan unsur lain mempunyai keterkaitan.

3. Tahap-Tahap Perencanan Pembangunan

Penyusunan suatu perencanaan pembangunan, ada tahapan-tahapan yang harus dijalani secara berurutan. Hal ini sesuai dengan penyataan Tjokroamidjojo (1987) bahwa dalam suatu perencanaan pembangunan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan melihat perencanaan pembangunan merupakan kegaiatan yang berkelanjutan, antara lain:

a) Penyusunan rencana

1) Tinjauan keadaan

Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana (revies before take of) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance). Kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah masalah pokok yang masih dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah

dicapai untuk menjamin kontiunitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.

2) Perkiraan keadaan masa yang akan datang akan dilalui rencana Sering juga disebut sebagai forecasting. Hal ini diperlukan data-data statistik, sebagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungankecenderungan perspestik masa depan.

3) Penetapan tujuan rencana (*Plan Objectives*)

Hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana.

4) Identifikasi kebijakan

Suatu kebijakan atau *policy*, mungkin perlu didukung oleh program-program pembangunan. Supaya operasionalnya rencana kegiatan-kegiatan usaha ini bisa lebih, perlu dilakukan berdasar pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar *opportunity cost* dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung oleh *feasibility studies* dan survei-survei pendahuluan.

5) Tahap persetujuan rencana

Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Disini diusahakan pula penyelarasan dengan perencanaan pembiayaan

secara umum dari pada program-program perenanaan yang akan dilakukan.

b) Penyusunan program rencana

Tahap penyusunan program rencana dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali tahap ini perlu dibantu dengan penyPusunan suatu flow-chart, operation plan atau network plan.

c) Pelaksanaan rencana

Pelaksanaan rencana seringkali perlu dibedakan anatara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan rencana perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan.

d) Pengawasan atas pelaksanaan rencana

Adapun pengawasan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan yang sudah direncakanan,
- Apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.
- Dilakukan tindakan korektif terdapat penyimpangan-penyimpangan.
 Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem monitoring dengan

BRAWIJAN

mengusahakan pelaporan dan *feedback* (laporan balik) yang baik dari pelaksanaan rencana.

e) Evaluasi

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai *concurrent review*. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap pelaksanaan rencana sebelumnya. Berdasarkan hasi-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahapan dari suatu perencanaan pembangunan sudah ditetapkan pada urutan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perencanaan pembangunan. Maka dari itu dalam penyusunannya harus dilewati secara berurutan agar berjalan dengan baik dan hasilnya juga sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa perencanaan pembangunan selalu berorientasi untuk kesejahteraan suatu negara dan merupakan proses yang berkesinambungan.

C. Otonomi Daerah

1. Konsep Dasar

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004), pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarkat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki hubungan yang erat dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk

Daerah:

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut beberapa pengertian konsep otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 tentang Pemerintahan

- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- 8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah

- provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- 13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Visi Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai kerangka menyelenggarakan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya: politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Di bidang politik, visi otonomi daerah harus dipahami sebagai sebuah proses bagi lahirnya kader-kader politik untuk menjadi kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis serta memungkinkan berlangsungnya

penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.

Adapun di bidang ekonomi, visi otonomi daerah mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastuktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah.

Sedangkan visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan., penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni social. Pada saat yang sama, visi otonomi daerah dibidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek social budaya harus diletakkan secara cepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan mempunyai daya keberlanjutan.

3. Landasan Hukum

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
 Di Daerah
- b) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- f) Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- g) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Ukuran-Ukuran Otonomi Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, ada beberapa ukuran yang dituliskan oleh Ibnu Syamsi (1983:190). Ukuran-ukuran tersebut antara lain:

 a) Kemampuan Struktur Organisasinya, stuktur organisasi pemerintah daerah mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya.

- b) Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah, aparat pemerintahan daerah mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang di idam-idamkan oleh pemerintah daerahnya.
- c) Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan struktur organisasi dan kelincahan aparatnya, Pemerintah daerah masih dituntut agar rakyat mau berperan serta dalam mencapai tujuan, terutama kegiatan pembangunan.
- d) Kemampuan Keuangan daerah, semua kegiatan untuk mecapai tujuan
- e) tersebut memerlukan biaya, dan biaya yang diburuhkan tidaklah sedikit.

Oleh karna itu perlu dipikirkan apakah pemerintah daerah mampu mengelola semua kegiatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangga sendiri.

5. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Dalam mewujudkan sebuah otonomi daerah yang yang dirasakan nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka pemerintah memerlukan prinsip-prinsip agar otonomi daerahnya berjalan sesuai kententuan diatas. Prinsip-prinsip tersebut diartikan oleh Widjaja (1998:125), yaitu:

- a) Nyata, berarti urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b) Dinamis, berarti sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

- c) Serasi, berarti urusan dilaksanakannya sesuai dengan arah dan kebijaksanaan pemerintah pusat/nasional.
- d) Bertanggung jawab, berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga dijelaskan bahwa terdapat dua prinsip otonomi daerah yaitu:

a) Otonomi Seluas-luasnya

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

b) Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

6. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Meningkatkan pelayanan umum, dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu pada semboyan negara kita "Bineka Tunggal Ika" walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon,

memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya.

Tujuan otonomi ini juga di kemukakan oleh Widjaja (1998:124-125), antara lain:

- a) Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (mangkung dan sangkil) berdaya guna dan berhasil guna.
- b) Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Pembangunan kestabilan politik dan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (pembaruan).
- d) Dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan.

D. Pendidikan

1. Konsep Dasar

Menurut George F. Knelled Ledi dalam bukunya yang berjudul *Of Education* (1967:63), pendidikan dapat dipandang dalam arti teknis, atau dalam arti hasil dan arti proses. Dalam artinya yang luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa (*mind*), watak (*character*), atau kemampuan fisik (*physical ability*) individu, pendidikan dalam arti ini berlangsung terus menerus (seumur hidup).

Selanjutnya menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian dirinya, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Jadi pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan. Dalam pendidikan, terjalin hubungan antara dua pihak, yaitu pihak pendidik dan pihak peserta didik yang di dalam hubungan itu berlainan kedudukan dan peranan setiap pihak, akan tetapi sama dalam hal dayanya yaitu saling mempengaruhi guna terlaksananya proses pendidikan (transformasi pendidikan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan) yang tertuju kepada tujuan-tujuan yang diinginkan.

2. Tujuan Pendidikan

Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan di Indonesia, memberikan penjelasan jelas mengenai tujuan pendidikan, yaitu dengan mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu kepada peserta didik agar mereka memiliki kepribadian baik dan sempurna dalam hidup, di mana ini akan sejalan dengan masyarakat, alam, dan lingkungan.

Tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, bab II pasal 3 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Dalam pasal 31 ayat 3, Undang-Undang dalam versi amandemen juga menuturkan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang". Hal ini dikuatkan pula dalam pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

3. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan bertujuan untuk menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat yaitu kebodohan dan ketertinggalan. Menurut UUSPN No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."

4. Mutu dan Kualitas Pendidikan

Menurut Departemen pendidikan nasional, Direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah (Dit.Dikdasmen) menyatakan bahwa Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Sedangkan Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (2011:2) merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan

sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

5. Indikator Pendidikan

Menurut Firda Arwanda dalam jurnalnya yang berjudul Identifikasi Indikator Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan (2015:2) Indikator merupakan suatu konsep dan selakigus ukuran. Sebagai suatu konsep, indikator pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil pendidikan atau dampak dari suatu instrumen kebijakan pendidikan. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu keadaan empiris dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Indikator juga didefenisiskan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diinterpretasikan.

Firda Arwanda (2015:3) juga menjelaskan Ruang Lingkup dan Indikator-Indikator Pendidikan mencakup 3 pilar, yaitu (a) Perluasan akses dan pemerataan pendidikan, (b) Mutu dan relevansi pendidikan, serta (c) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Indikator akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya untuk setiap kelompok usia sekolah dan setiap jenjang pendidikan. Akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat

dari 3 aspek, yaitu: (a) Angka Partisipasi Sekolah (APS), (b) Angka Partisipasi Murni (APM), serta (c) Angka Partisipasi Kasar (APK).

Indikator mutu dan relevansi pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur input-proses-output. Masukan (*input*) dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu akan membuahkan dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek (*output*) dan hasil jangka panjang (*outcome*). Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

- a) Indikator masukan/input pendidikan, mencakup:
 - 1) Tingkat ketersediaan/penguasaan/kepemilikan buku teks;
 - Persentase ilustrasi yang menggambarkan contoh aktivitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan;
 - 3) Proporsi guru yang layak dan sesuai.
- b) Indikator proses pendidikan, terkait dengan proses belajar mengajar di kelas termasuk bagaimana guru/tenaga pendidik memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan.
- c) Indikator hasil jangka pendek (output) pendidikan, mencakup:
 - 1) Tingkat prestasi akademik siswa, termasuk hasil ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional;
 - 2) Persentase kelulusan.
- d) Indikator hasil jangka panjang (outcome) pendidikan, mencakup:
 - 1) Jobseeking period (rata-rata lama mencari kerja);
 - 2) Persentase lulusan yang bekerja

E. Kebijakan Pendidikan

1. Definisi Kebijkan Pendidikan

Kata "kebijkan" merupakan terjemahan dari kata "policy" dalam Bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintahan. Kebijkan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai:

- a) Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan;
- b) Yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana;
- c) Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi;
- d) Sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.

Policy diartikan juga hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni masyrakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya strategi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut *Eulau* dan *Prewitt* yang di kutip oleh Jones (1995), bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya Jones menganalisis komponen-komponen pengertian kebijakan yang terdiri dari:

- a) Goal, atau tujuan yang diinginkan;
- b) *Plan*, atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
- c) Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
- d) *Decision*, ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana;
- e) *Effect*, yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer atau sekunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya atau tidak).

Solichin Abdul Wahab (1990), menjelaskan mengenai ragam penggunaan istilah kebijakan yaitu: (1) merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu; (2) pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki; (3) usulan khusus; (4) keputusan pemerintah; (5) bentuk pengesahan formal; (6) program; (7) keluaran; (8) hasil akhir; (9) teori atau model; (10) proses.

Istilah "kebijakan pendidikan" merupakan terjemahan dari "educational policy" yang tergabung dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunujuk kepada bidangnya. Jadi

kebijkan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut Gamage dan Pung (2003), kebijakan pendidikan dapat juga dipahami sebagai perangkat panduan yang memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan persoalan substantif. Garis panduan dimaksud mencakup istilah umum (general terms), dan tindakan yaitu yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan masalah yang ada. Garis panduan atau kebijakan pendidikan akan menjadikan kepala sekolah, staf, dan personalia lainnya sebagai warga sekolah dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan arah yang jelas.

Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

2. Makna Kebijakan Publik dalam Pendidikan

Kebijakan publik bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemetintah dan aktor diluar pemerintah, dan

mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesionalitas staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan.

Proses pembuatan kebijakan pendidikan semestinya melalui tahapan yang panjang, karena disamping pemberlakuannya sangat memengaruhi masyarakat luas, juga aktor-aktor yang terlibat juga sangat banyak. Winarno (2005). Maupun Dunn (2003), membaginya menjadi lima tahapan, yakni (1) penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, dan (5) penilaian kebijakan. Jika berdasarkan definisi diatas, lima tahap tersebut harus memerhatikan tiga hal pokok yaitu (1) pemerintah; (2) aktor-aktor diluar pemerintah seperti kelompok kepentingan dan kelompok penekan, dan (3) faktor-faktor selain manusia yang akan maupun telah memengaruhi kebijakan.

Kebijakan pendidikan menurut Devine (2007), memiliki empat dimensi pokok, yaitu:

- a) Dimensi normatif, yang terdiri atas nilai, standar, dan filsafata. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada,
- b) Dimensi strukural, berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain), dan satu struktur organisasi

SRAWIJAYA

- metode, dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan pendidikan,
- c) Dimensi konstitutif, terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan,
- d) Dimensi teknis, yang menggabungkan pengembangan, praktik, implementasi, dan penilaian dan pembuatan kebijakan pendidikan.

3. Perlunya Kebijakan Pendidikan

Suatu kebijakan diambil dan diputuskan dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (*das sollen*) dan dunia nyata (*das sein*). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara dunia cita-cita dan dunia kenyataan.

Masalah pendidikan merupakan salah satu dari bidang pemerintahan yang sering dipandang sangat vital dan menentukan. Itulah sebabnya bidang pendidikan menjadi satu-satunya urusan pemerintah yang plafon anggrannya ditentukan secara pasti dalam perundang-undangan, seperti yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensinya, setiap pelaksana dan penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan kebijakan pendidikan sebagaimana mestinya.

Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengusaan ilmu pengetahuan informasi dan

teknologi sebagai persyaratan bagi masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan dalam arti yang luas, yaitu membebaskan masyarkat dari kebodohan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Kebijakan yang sesuai dan berpihak dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas dan prospektif sangat diperlukan, terutama ketika kita melihat bagaimana kondisi bangsa yang dialami selama ini. Banyak tudingan negatif terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan karena dianggap tidak mampu menghasilkan *output* yang berkualitas. Padahal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tersebut banyak faktor penentu, salah satunya adalah kebijakan pendidikan yang benara dalam bidang pendidikan itu sendiri. Dengan dimikian, pengurusan masalah-masalah pendidikan dibutuhkan adanya intervensi dari penguasa atau pemerintah.

4. Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan

Kehadiran UU Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah, telah membawa sejumlah perubahan dalam tatanan pemerintah, terutama dengan diserahkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan tersebut adalah di bidang pendidikan. Namun otonomi di bidang pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang pemerintahan lainnya yang

berhenti pada tingkat kabupaten dan kota. Otonomi di bidang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten dan kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yaitu lembaga pendidikan sekolah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pendidikan membawa implikasi terhadap desentralisasi pendidikan serta pendidikan berbasis masyarakat. Ppenyelenggaraan desentralisasi pendidikan dan pendidikan berbasis masyarakat akan berjalan dengan baik jika isu-isu kebijakan pendidika nasional seperti masalah mutu, pemerataan, relevansi, masalah guru, sarana, dan fasilitas, kesenjangan, kurikulum, dan isu-isu lainnya berhasil direkonstruksi.

Keberhasilan menerapkan desentralisasi pendidikan sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan pemerintah penyelenggara, konkretnya sangat tergantung pada bagaimana pelakasana dan perumuas kebijakan dapat menekana sisi lemah yang mungkin muncul, disamping faktor kesiapan daerah dan sekolah.

F. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

1. Konsep Dasar

Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi

peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global (Dedi Dwitagama, 2007).

Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.

Keunggulan yang dimiliki suatu daerah dapat lebih memberdayakan penduduknya sehingga mampu meningkatkan pendapatan atau meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena manfaat dan pendapatan yang diperoleh menjadikan penduduk daerah tersebut berupaya untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas keunggulan lokal yang dimiliki daerahnya sehingga bermanfaat bagi penduduk daerah setempat serta mampu mendorong persaingan secara kompetitif pada tingkat nasional maupun global. Dalam bukunya Jamal Ma'mur (2012:31),menjelaskan dengan memberdayakan keunggulan lokal maka dapat menjawab permasalahan yang ada, antara lain:

- a) Keunggulan lokal apa yang dapat dikembangkan
- b) Adakah manfaatnya bagi masyarakat
- c) Bagaimana cara mengembangkannya
- d) Bagaimana cara pembelajarannya yang efektif dan efesien
- e) Infrastruktur apa yang diperlukan
- f) Berapa lama pembelajaran keunggulan lokal dilaksanakan

Keenam hal itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain untuk menyukseskan program pendidikan berbasis keunggulan lokal. Menurut Akhmad Sudrajat (2008), kualitas dari proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, yang lebih dikenal dengan istilah 7 M, yaitu *man, money, machine, material, method, marketing, and management*. Jika sumber daya yang diperlukan bias dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut dapat memberikan hasil yang bagus, demikian sebaliknya.

2. Potensi Keunggulan Lokal

Menurut Akhmad Sudrajat, konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasi dari berbagai potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan geografis. Uraian selengkapnya ialah sebagai berikut:

a) Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan hidup. contoh bidang pertanian ialah padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya; bidang perkebunan seperti karet, tebu, tembakau, sawit, cokelat, dan lain-lain; bidang peternakan, misalnya unggas, kambing, sapi, dan lain sebagainya; bidang perikanan, seperti ikan laut dan tawar, rumput laut, tambak, dan lain-lain.

b) Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia dengan segenap potensinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformative, serta mampu

mendayagunakan potensi alam disekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan.

Pengertian adaptif artinya mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan IPTEK, dan perubahan sosial budaya. SDM merupakan penentu semua potensi keunggulan lokal. SDM sebagai sumber daya, bisa bermakna positif dan negatif, tergantung pada paradigma, kultur, dan etos kerja. Dengan kata lain, tidak ada realisasi dan implementasi konsep keunggulan lokal tanpa melibatkan dan memosisikan manusia dalam proses pencapaian program keunggulan.

SDM dapat mepengaruhi kualitas dan kuantitas SDA, mencirikan identitas budaya, mewarnai sebaran geografis, dan dapat berpengaruh secara timbal balik kepada kondisi geologi, hidrologi, dan klimatologi setempat akibat pilihan aktivitasnya, serta memiliki latar sejarah tertentu yang khas.

c) Potensi Geografis

Objek geografi, antara lain meliputi objek formal dan material. Objek formal geografis adalah fenomena geosfer yang terdiri atas atmosfer bumi, cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan fauna dan flora), serta antroposfer (lapisan manusia yang merupakan tema sentral).

Pendekatan studi geografi bersifat khas. Dengan demikian, pengkajian keunggulan lokal dari aspek geografi perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. Pendekatan itu meliputi, pendekatan keruangan (*spatial approach*), lingkungan (*ecological approach*), dan kompleks wilayah (*integrated approach*).

Pendekatan keruangan mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui penggambaran letak distribusi, relasi, dan interrelasinya. Sedangkan pendekatan lingkungan berdasarkan interaksi organisme dengan lingkungannya. Dan, pendekatan kompleks wilayah memadukan kedua pendekatan tersebut.

Tentu saja, tidak semua objek dan fenomena geografi berkaitan dengan konsep keunggulan lokal. Sebab, keunggulan lokal dicirikan oleh nilai guna fenomena geografis bagi kehidupan dan penghidupan yang memiliki, dampak ekonomis, dan pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga potensi tersebut menjadi sumber utama dalam menentukan keunggulan lokal yang bisa dikembangkan sekolah dengan melibatkan banyak pihak. Kelima potensi itu dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berimplikasi, serius bagi peningkatan ekonomi, pengetahuan, dan daya saing daerah.

3. Tujuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah agar siswa mengetahui keunggulan lokal daerah dimana dia tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, selanjutnya siswa mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan dan jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya, tradisi,

sumber daya yang menjadi ungulan daerah serta mampu bersaing secara nasional maupun global.

Supaya keunggulan yang dimiliki daerah dapat dipahami siswa dan keunggulan daerah dapat menyejahterakan masyarakatnya diharapkan keunggulan daerah dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat dapat menjaga kelestarian potensi daerahnya dan dapat memanfaatkan potensi daerahnya sendiri dengan semaksimal mungkin, sehingga bermanfaat bagi hidupnya, dan bagi masyarakat pada umumnya.

Dengan pendidikan berbasis keunggulan lokal ini, mereka diharapkan mencintai tanah kelahirannya, percaya diri menghadapi masa depan, dan bercita-cita mengembangkan potensi lokal, sehingga daerahnya bisa berkembang pesat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan informasi. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa harus terlibat aktif dalam program istimewa ini, karena benar-benar menjanjikan masa depan daerah yang cerah.

4. Landasan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Ada beberapa hal yang menjadi landasan pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b) PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi dalam bidang pendidikan.

- c) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 Ayat 5 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal.
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 14 Ayat 1 bahwa kurikulum untuk SMP/MTS/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sudah diatur bahwa pelaksanaan pendidikan diluar kewenang pemerintah pusat, dan harus dilakukan di daerah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum sebagai salah satu substansi utama dalam pengembangan pendidikan perlu didesentralisasikan, terutama kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah.

5. Ruang Lingkup PBKL

Pendidikan berbasis keunggulan lokal mempunyai ruang lingkup, sebagaimana berikut:

- a) Lingkup situasi dan kondisi daerah, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tersebut, yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, seni, dan budaya atau lainnya yang berupa hasil bumi, tradisi, pelayanan/jasa, atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah.
- b) Lingkup keunggulan lokal meliputi potensi keunggulan lokal, cara mengelola, mengemas, mengoptimalkan, memasarkan, atau proses lainnya yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah sehingga

dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan maupun pendapatan asli daerah (PAD).

6. Langkah Pengembangan PBKL

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal (Jamal Ma'mur, 2013:45), seperti:

- a) Penyusunan desain,
- b) Kajian konsep,
- c) Study literatur dan lapangan,
- d) Penyusunan model,
- e) Uji coba model,
- f) Analisis hasil,
- g) Perbaikan/penyempurnaan model,
- h) Seminar (persentasi hasil),
- i) Finalisasi model, dan
- j) Pelaporan.

Langkah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal ini sangat ideal. Namun, untuk lembaga yang baru memulai, tentu tidak serumit dan seideal itu. Hal yang penting adalah ada forum musyawarah kemudian hasilnya dikembangkan lagi dengan melakukan *brainstorming* (curah gagasan) dengan birokrasi dan tokoh masyarakat.

Hasilnya didiskusikan lagi untuk menentukan potensi lokal yang akan digarap secara serius untuk mencapai keunggulan lokal. Dalam pelaksanaannya

juga harus terus dievaluasi dan dikembangkan terus menerus, sehungga tidak ketinggalan zaman dan sesuai dengan konsep perencanaan berkelanjutan.

7. Pihak yang Terlibat

Dalam melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pihak yang harus teribat adalah Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), perguruan tinggi, serta instansi/lembaga di luar Depdiknas, misalnya, pemda/bappeda, departemen lain terkait, Dewan Pendidikan, dunia usaha/industri, tokoh masyarakat dan tenaga ahli individu, kelompok atau pihak lain.

Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana berikut:

- a) PTK (Pendidik Tenaga Kependidikan). Secara umum, peran, tugas, dan tanggung jawab PTK adalah:
 - 1) Mengidentifikasikan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing
 - 2) Menentukan komposisi atau susunan jenis keunggulan lokal
 - Mengidentifikasi bahan kajian keunggulan lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing
 - 4) Menentukan prioritas bahan kajian keunggulan lokal yang dilaksanakan
 - 5) Mengembangkan silabus keunggulan lokal dan perangkat kurikulum keunggulan lokal lainnya yang dilakukan bersama sekolah, mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh BSNP (Badan Stansar Nasional Pendidikan)

- b) Perguruan Tinggi dan LPMP. Perguruan tinggi dan LPMP memberikan bimbingan dan bantuan teknis dalam beberapa hal, sebagaimana berikut:
 - Mengidentifikasi dan menjabar keadaan, potensi, serta kebutuhan lingkungan ke dalam komposisi jenis keunggulan lokal
 - 2) Menentukan lingkup masing-masing bahan kajian/pelajaran
 - 3) Menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan jenis bahan kajian/pelajaran
- c) Instansi atau Lembaga di Luar Depdiknas. Secara umum, instansi atau lembaga di luar Depdiknas berperan dalam beberapa hal berikut:
 - 1) Memberikan informasi mengenai potensi daerah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang ada di daerah yang bersangkutan, serta prioritas pembangunan saerah di berbagai sektor yang dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan
 - Memberikan gambaran mengenai kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang diperlukan pada sektor-sektor tertentu
 - 3) Memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, dan tenaga dalam menentukan prioritas keunggulan lokal sesuai dengan nilainilai dan norma setempat
 - 4) Pemda setempat berkewajiban melengkapi sarana prasarana pendidikan yang diperlukan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

8. Rambu-Rambu PBKL

Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan keunggulan lokal adalah sebagai berikut:

- a) Sekolah yang mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran keunggulan lokal. Apabila sekolah belum mampu mengembangkan hal tersebut, maka sekolah dapat melaksanakan keunggulan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh sekolah, atau bisa meminta bantuan kepada sekolah yang terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Jika beberapa sekolah dalam daerah belum satu mampu mengembangakan, maka dapat meminta bantuan TPK daerah, atau dari LPMP di provinsinya.
- b) Bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, serta sosial peserta didik. Pelaksanaan kegaitan belajarmengajar diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan peserta didik dan tidak menggangu penguasaan pada kurikulum nasional.
- c) Program pengajaran hendaknya dikembangkan dengan melihat kedekatan dengan peseta didik yang meliputi dekat secara fisik dan secara psikis. Dekat secara fisik, maksudnya terdapat dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah peserta didik. Sedangkan, dekat secara psikis ialah bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencernakan informasi sesuai dengan usianya. Untuk itu, bahan

pengajaran hendaknya disusun berdasarkan prinsip belajar, yaitu bertitik tolak dari dari hal-hal konkret ke abstrak, dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui, dari pengalaman lama ke pengalaman baru, dan dari yang mudah/sederhana ke yang lebih sukar/rumit dengan tidak mengenyampingkan kualitas. Selain itu bahan kajian/pelajaran hendaknya bermakna bagi peserta didik, yakni bermanfaat Karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

- d) Bahan kajian/pelajaran hendaknya memberikan keluwesan terhadap guru dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar, seperti buku dan narasumber. Dalam kaitan dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan sekolah. Misalnya, dengan memanfaatkan tanah/kebun sekolah, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia usaha/industri (lapangan kerja), atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, guru hendaknya bisa memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar-mengajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.
- e) Bahan kajian keunggulan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu pasa suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. Namun demikian, bahan kajian keunggulan lokal tertentu tidak harus secara terus-menerus diajarkan dari kelas X-XII. Bahan kajian keunggulan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester, atau satu tahun ajaran.

f) Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran keunggulan lokal perlu memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran keunggulan lokal pada setiap semester.

Rambu-rambu pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal tersebut menjadi tantangan kepala sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan sekolah. Artinya, bagian kurikulum harus sudah menuntaskan tugas-tugas yang terkait dengan profesionalitas guru, sehingga persoalan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sudah tuntas. Guru juga harus dibekali berbagai teknik pembelajaran inovatif. Guru memang harus menjadi sosok yang proaktif mengembangkan potensinya, khusus yang berkaitan dengan materi yang diampunya dan metodologi mengajarnya. Perpaduan penguasaan materi dan metodologi bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang bermutu tinggi dan memuaskan anak didik, orang tua, komite, serta mengharumkan reputasi sekolah ke dalam dan keluar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Mix Methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan penekatan penelitian yang mengombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *Mix Methods* adalah metode penelitian dengan mengombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan obyektif.

Pendekatan *Mix Methods* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan didalam bab sebelumnya, rumusan masalah yang pertama dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif dan rumusan masalah yang kedua dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teknik campuran bertahap, menurut Creswell (2010:313) strategi ini merupakan strategi dimana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode yang lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan wawancara terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu dilengkapi dengan data kuantitatif, dalam penelitian ini peneliti mengambil data kuantitatif menggunakan data angka dari BPS.

BRAWIJAY

Dalam melakukan penelitian terhadap sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, penulis dapat memilih alternatif dari berbagai macam metode penelitian yang ada. Metode penelitian ini dapat digunakan dalam penemuan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian dapat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan penulis dalam mencapai tujuan.

Adapun tujuan penelitian *Mix Methods* ini adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti yaitu menganalisa potensi keunggulan lokal di Kabupaten Jombang serta mengenai program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang dengan dukungan kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variable penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dilakukan untuk membatasi studi sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang lebih relevan, selain itu dalam penelitian kualitatif juga menghendaki batas-batas dalam penelitian berdasarkan atas fokus yang telah ditentukan yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Fokus penelitian adalah hal-hal yang menjadi batas dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan

dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga penulis akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Penetapan focus penelitian juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiasan didalam mendeskripsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman penulis atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakan lainnya (Moleong, 2012:97). Dalam kata lain penelitian ini didasarkan atas objek penelitian yang ingin diketahui penulis meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumusakan, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian yaitu sebagai berikut maka penulis menetapkan fokus pada penelitian mengenai program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang diantaranya:

- 1. Potensi keunggulan lokal di Kabupaten Jombang
- 2. Program pendidikan berbasis keunggulan lokal, meliputi:
 - a. Perencanaan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Program
 Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL)
 - Kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah mengenai pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL)
 - c. Sumber daya yang mendukung terlaksananya program pendidikan berbasis kunggulan lokal di Kabupaten Jombang, meliputi:
 - 1) Sumber pembiayaan atau anggaran program PBKL
 - 2) Pelaku atau SDM yang mendukung program PBKL

3) Ketersediaan fasilitas penunjang didalam program PBKL

C. Lokasi Penelitian

Moleong (2012:128) berpendapat bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1992:34) bahwa lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan substantif dan teoritik. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti.

Dalam penelitian terhadap kebijakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) penelitian ini berlangsung di:

- 1. Dinas Pendidikan Kab. Jombang
- 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Jombang

Peneliti merasa tertarik untuk mengambil penelitian di Kabupaten Jombang karena potensi keunggulan lokal yang terdapat pada daerah tersebut dapat dikelola dengan baik jika memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL).

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2012: 157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen sumber data tertulis. Berdasarkan hal tersebut peneliti membagi jenis data yang meliputi, tindakan, pernyataan, sumber data tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan penelitian. Pada umumnya data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga memperoleh data dan informasi yang lengkap, yang mungkin tidak ditemukan dari data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari aktor yang terlibat. Adapun responden peneliti dalam pengumpulan data:

- a) Bapak Jumadi, S.Pd, M.Si selaku Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
- Bapak Ahmad Rofiq Ashari, ST selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang
- c) Ibu Chris Maya Rinelda, ST selaku Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
- d) Bapak Budi Winarno, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

2. Data Sekunder

Data yang berasal dari dokumen yaitu berbagai dokumentasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian berupa peraturan daerah, peraturan gubernur serta jurnal dan buku-buku literatur yang diperoleh dari suatu

organisasi atau berasal dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengolahnya sehingga dapat melengkapi data-data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

- a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- b) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 tentang
 Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- f) RPJP Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 2005-2025
- g) Dokumen SIDa (Sistem Inovasi Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016
- h) Dokumen Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2015-2017
- i) Dokumen Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015-2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Kata data adalah bentuk jamak dari kata *datum* yang berasal dari Bahasa Yunani yang menunjuk kepada suatu keterangan yang berwujud angka. Istilah data-data yang dimaksudkan untuk menyatakan banyak data menjadi tidak tepat karena data sendiri sudah merupakan kata yang mempunyai pengertian jamak (Matin, 2013:15).

Burhan Bungin (2010:107), menjelaskan bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah teknik wawancara, observasi dan bahan dokumenter, sehingga pengumpulan data pada penelitian ini juga mengunakan tiga teknik tersebut.

1. Teknik Interview/Wawancara

Hasan dalam Emzir (2012:50) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan. Salah satu orang yang melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti. Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh penulis dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan penulis merekam jawaban-jawaban dari orang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode atau teknik semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan sebagai acuan dasar, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis terus berkembang seiring dengan jawaban dan informasi yang diberikan oleh informan, dengan demikian penulis dapat menemukan permasalahan penelitian secara terbuka dan informan yang diwawancarai dapat memberikan informasi dan menyampaikan pendapatnya.

Menurut Emzir (2012:37) observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara tidak langsung maupun langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis, pengamatan secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam

Pada penelitian ini metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi potensi keunggulan di Kabupaten Jombang, sarana dan prasarana pelaksanaan program PBKL, serta arah kebijakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam memperoleh data sekunder peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, dengan cara mencatat dan memanfaatkan data dan arsip yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini serta dari jurnal-jurnal yang terkait dari media cetak maupun media elektronik

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi guna memperkuat data yang telah diperoleh sehingga dapat ditarik sebuah hasil akhir yaitu kesimpulan penelitian. Metode dokumentasi yang digunakan bersumber pada perundang-undangan yang relevan, peraturan daerah Kabupaten Jombang mengenai program pendidikan PBKL, buku, jurnal, dan studi terdahulu yang mendukung sebagai studi kepustakaan dalam pelaksanaan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola, dan mengintepretasikan informasi dari para informan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2006:136), instrumen penelitian adalah alat fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penulis/peneliti itu sendiri. Peneliti melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara kemudian menganalisis data yang didapat dari lapangan dan membuat kesimpulan.
- 2. Pedoman wawancara (interview guide), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara penulis membuat pedoman wawancara yang berisi materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang berasal dari informan untuk mengetahui

BRAWIJAYA

- data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.
- 3. Alat/Perangkat penunjang untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman melalui *handpone* penulis dan buku catatan milik penulis.

G. Teknik Analisis Data

Metode diskriptif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan segenap fakta atau karakteristik populasi tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat (Arikunto, 2002:22). Pada studi ini metode diskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan program pendidikan dan karakteristik Potensi Wilayah di Kabupaten Jombang. Sehingga, terdapat beberapa metode analisis yang dapat diguankan untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Metode Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Metode ini dapat dipergunakan untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah untuk menggetahui seberapa besar spesialisasi sektor-sektor basis atau keunggulan kompetitif (Adisasmita, 2005:29) suatu sektor tertentu di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Dalam praktek penggunaannya pendekatan LQ tidak terbatas hanya pada bahasan ekonomi saja namun juga dimanfaatkan dalam menentukan komodiatas sektor-sektor keunggulan di suatu wilayah/daerah berdasarkan potensinya. Dalam penelitian ini, Analisis *Location Quotient* (LQ) dipergunakan untuk mengetahui Potensi Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang berdasarkan perbadingan nilai produksi sektor, sub sektor dan komoditi di kabupaten Jombang dengan nilai produksi sektor, sub sektor dan komoditi yang sama di tingkat Propinsi Jawa Timur dengan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

Si : jumlah produksi sektor-i Kabupaten Jombang

S : jumlah produksi komoditas total Kabupaten Jombang

Ni : jumlah produksi komoditas sektor-i Propinsi Jawa Timur

N : jumlah produksi komoditas total Propinsi Jawa Timur

Penafsiran hasil perhitungan:

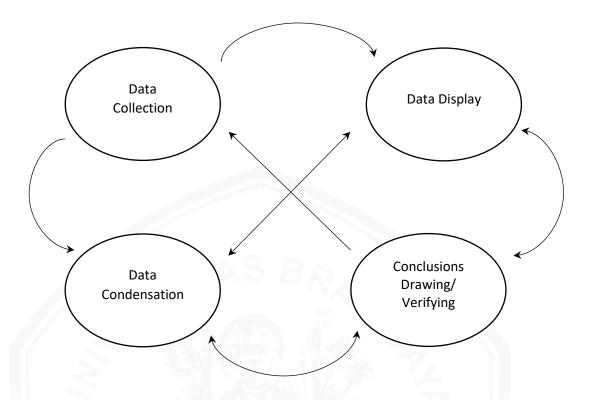
LQ > 1: Merupakan sektor basis serta memiliki keunggulan

LQ = 1: Bukan merupakan sektor basis (tetap)

LQ < 1: Merupakan sektor non basis serta bukan keunggulan

2. Analisis Data Miles & Huberman

Sugiyono (2009:244), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan model interaktif berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana. Adapun komponen-komponen dalam analisis data dalam model interaktif ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

Analisis data model interaktif dilakukan melalui 4 prosedur yaitu, data collection, data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Prosedur-prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Data Collection (Pengumpulan Data)

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data wawancara, dokumentasi, dan dokumendokumen yang dibutuhkan selama penelitian berdasarkan fokus penelitian. Catatan lapangan tersebut dirangkum secara sistematis

untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hasil yang diperoleh ketika penelitian serta untuk mempermudah proses pelacakan kembali terhadap data yang diperoleh, apabila hal tersebut diperlukan.

b) Data Condensation (Kondensasi Data)

Kondensasi data, diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

c) Data Display (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memeberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini

dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

d) Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

H. Keabsahan Data Penelitian

Pemeriksaan terhadap data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moloeng, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bertujuan agar datra dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

Uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah uji *Credibility* (kredibilatas) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilaksanakan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka, dalam uji kredibilitas dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:

BRAWIJAY

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data dengan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.

2. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secaara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan krobologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan dan disajikan sudah benar atau belum.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2007:273).

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar.

c) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Pendukung dalam penelitian dapat berupa dokumen autentik ataupun foto.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jombang terletak antara 7°20'48,60" sampai dengan 112°27'21,26" Bujur Timur

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri proimer Surabaya-Solo- Jakarta dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya- Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam Kawasan Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, dan perkotaan Jombang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yakni kawasan perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala kabupaten atau beberapa kecamatan).



Gambar 3. Peta Geografis Kabupaten Jombang

Sumber: Peta Tematik Indonesia – WordPress.com

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran rendah, yakni 90% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 500meter dpl. Secara umum Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 bagian:

- Bagian utara, terletak di sebelah utara Sungai Brantas, meliputi sebagian besar Kecamatan Plandaan, Kecamatan Kabuh, dan sebagian Kecamatan Ngusikan, dan Kecamatan Kudu. Merupakan daerah perbukitan kapur yang landai dengan ketinggian maksimum 500m di atas permukaan laut.
- Bagian tengah, yakni di sebelah selatan Sungai Brantas, merupakan dataran rendah dengan tingkat kemiringan hingga 15%. Daerah ini merupakan kawasan pertanian dengan jaringan irigasi yang ekstensif serta kawasan permukiman penduduk yang padat.
- Bagian selatan, meliputi Kecamatan Wonosalam, dan sebagian Kecamatan Bareng, dan Mojowarno. Merupakan daerah pegunungan dengan kondisi wilayah yang bergelombang. Semakin ke tenggara, semakin tinggi. Hanya sebagian Kecamatan Wonosalam yang memiliki ketinggian di atas 500 m.

Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km², atau menempati sekitar 2,5 % luas wialayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- Utara, berbatasan dengan Kab. Lamongan dan Kab. Bojonegoro;
- Timur, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto;
- Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;
- Barat, berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk

BRAWIJAYA

Tabel 2. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Batas Administrasi

| No | Kecamatan | Luas (Km²) | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah Dusun |
|----|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Bandarkedungmulyo | 32,50 | 11 | 42 |
| 2 | Perak | 29,05 | 13 | 36 |
| 3 | Gudo | 34,39 | 18 | 75 |
| 4 | Diwek | 47,70 | 20 | 100 |
| 5 | Ngoro | 49,86 | 13 | 82 |
| 6 | Mojowarno | 78,62 | 19 | 68 |
| 7 | Bareng | 94,27 | 13 | 50 |
| 8 | Wonosalam | 121,63 | 9 | 48 |
| 9 | Mojoagung | 60,18 | 18 | 60 |
| 10 | Sumobito | 47,64 | 21 | 76 |
| 11 | Jogoroto | 28,28 | 11 | 46 |
| 12 | Peterongan | 29,47 | 14 | 56 |
| 13 | Jombang | 36,40 | 20 | 72 |
| 14 | Megaluh | 28,41 | 13 | 41 |
| 15 | Tembelang | 32,94 | 15 | 65 |
| 16 | Kesamben | 51,72 | 14 | 61 |
| 17 | Kudu | 77,75 | 11 | 47 |
| 18 | Ngusikan | 34,98 | 11 | 39 |
| 19 | Ploso | 25,96 | 13 | 50 |
| 20 | Kabuh | 97,35 | 16 | 87 |
| 21 | Plandaan | 120,40 | 13 | 57 |
| | Jumlah | 1.159,50 | 306 | 1.258 |

Sumber data: Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BRAWIJAY

2. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Visi adalah sebuah cita-cita kedepan sebagai arah dan tujuan dari suatu entisitas. Berpijak pada kondisi Kabupaten Jombang pada saat ini, dengan memperhitungkan tantangan yang dihadapi sampai tahun 2025, dan mempertimbangkan kondisi potensi daerah Kabupaten Jombang serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang 2005-2025.

Dalam periode Tahun 2014-2018, Visi Pembangunan Kabupaten Jombang adalah "Jombang Sejahtera Untuk Semua". Makna dari visi tersebut: "JOMBANG" adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. "SEJAHTERA UNTUK SEMUA" adalah tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Sesuai dengan harapan dari visi "**Jombang Sejahtera Untuk Semua**", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut:

a) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya. Dengan latar belakang masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan beragama.

b) Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Sedangkan pelayanan pendidikan bertujuan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan

gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar.

Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat terus tumbuh dan berkembang menuju kesejahteraan. Pemenuhan hak atas pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat.

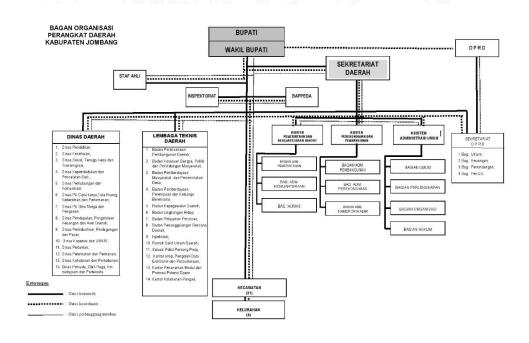
d) Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

e) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 4. Bagan Strukur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang 2014-2018

Sumber: jombangkab.go.id

BRAWIJAY

3. Kodisi Fisik Geografis

Kondisi geografis sebagian wilayah Kabupaten Jombang merupakan dataran dan sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara 4,38% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan 0,62% memiliki ketinggian > 700 meter.

Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi tiga satuan morfologi, yaitu :

- a. Bagian selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkan, yang meliputi sebagian Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan Bareng, serta Kecamatan Wonosalam, dengan puncaknya antara lain G. Gede-1 (1.629 m), G. Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2 (1.868 m), G. Watujuwadah) (1.629 m) dan G. Tambakmerang (1.360 m). Kondisi wilayah yang bergelombang dan berada di daearah pegunungan sangat cocok untuk tanaman perkebunan;
- b. Bagian tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang dicirikan oleh topografi datar dengan elevansi 21-100 meter dpal dan kemiringan lereng 0-2 %, dimana terdapat aliran sungai besar yang permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-anak sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai permukiman dan perkotaan yang

pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur, serta terdapat lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini elevasi berkisar antara 21 hingga 100 meter dpal. Didominasi oleh dataran rendah dengan kondisi tanah yang subur yang sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija;

c. Bagian utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi sebagian Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh adanya pola kontur yang kasar, dengan kemiringan lereng 16-40%. Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh proses erosi dan banyaknya puncakpuncak bukit rendah, seperti G.Selolanang (261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G.Resek (164 m), dan G. Pucangan (168 m).

4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk (26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.271,97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atasa dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan

pertanian lahan basah (40.676 Ha), kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (2.122,30 Ha).

5. Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 berdasarkan hasil perhitungan BPS (Kabupaten Jombang dalam Angka 2017) sebesar 1.247.303 jiwa terdiri atas 620.405 jiwa penduduk laki-laki (49,74%) dan 626.898 jiwa penduduk perempuan (50,26%). Penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 bertambah sebesar 6.318 jiwa atau meningkat 1,97% jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2015 yang sebesar 1.240.985 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 tergolong tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebesar 1.075 jiwa/km². Sex rasio atau perbandingan jenis kelamin penduduk Kabupaten Jombang tahun 2016 sebesar 99, kondisi ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jombang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dimana setiap 100 penduduk berjenis perempuan terdapat 99 penduduk berjenis laki-laki.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

| No. | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 0 – 4 tahun | 53.089 | 50.254 | 103.343 |
| 2 | 5 – 9 tahun | 52.603 | 49.918 | 102.521 |
| 3 | 10 – 14 tahun | 53.275 | 50.731 | 104.006 |
| 4 | 15 – 19 tahun | 54.384 | 51.643 | 106.027 |
| 5 | 20 – 24 tahun | 46.702 | 45.802 | 92.504 |
| 6 | 25 – 29 tahun | 46.659 | 48.550 | 93.209 |
| 7 | 30 – 34 tahun | 47.287 | 47.410 | 94.697 |
| 8 | 35 – 39 tahun | 46.322 | 47.830 | 94.652 |
| 9 | 40 – 44 tahun | 47.827 | 19.125 | 96.952 |
| 10 | 45 – 49 tahun | 43.775 | 45.885 | 89.660 |
| 11 | 50 – 54 tahun | 38.221 | 38.665 | 76.886 |
| 12 | 55 – 59 tahun | 29.776 | 29.422 | 59.198 |
| 13 | 60 – 64 tahun | 21.396 | 22.070 | 43.466 |
| 14 | 65 – 69 tahun | 16.215 | 18.880 | 35.095 |
| 15 | 70 – 74 tahun | 11.170 | 14.395 | 25.566 |
| 16 | > 75 tahun | 11.204 | 18.317 | 29.521 |
| | Jumlah | 620.405 | 626.898 | 1.247.303 |

Sumber: BPS - Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Usaha Utama Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Jombang 2016

| No. | Pendidikan Tertinggi | Angkatan Kerja | | | | |
|-----|----------------------|----------------|--------------|---------|--|--|
| | yang Ditamatkan | Bekerja | Pengangguran | Jumlah | | |
| 1 | SD/MI | 239.290 | 8.838 | 248.128 | | |
| 2 | SMP/MTs | 165.847 | 10.344 | 176.191 | | |
| 3 | SMA/MA | 95.786 | 6.477 | 102.263 | | |
| 4 | SMK | 79.095 | 6.953 | 86.048 | | |
| 5 | Diploma I/II/III | 6.265 | 1.539 | 7.804 | | |

| No. | Pendidikan Tertinggi | Angkatan Kerja | | | | |
|-----|----------------------|----------------|--------------|---------|--|--|
| | yang Ditamatkan | Bekerja | Pengangguran | Jumlah | | |
| 6 | Universitas | 43.955 | - | 43,955 | | |
| | Jumlah | 630.238 | 34.151 | 664.389 | | |

Sumber: BPS – Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2017

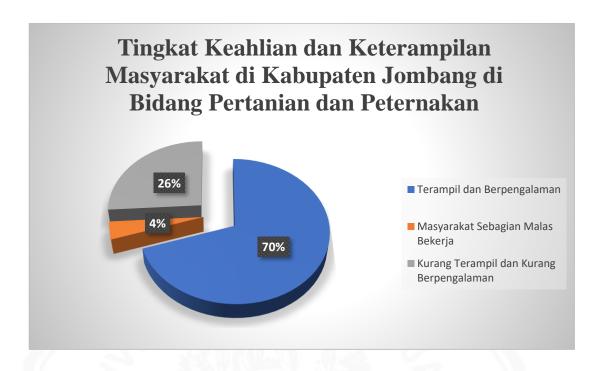
Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kalamin di Kabupaten Jombang 2016

| No. | Lapangan Usaha | Jenis Kelamin | | | |
|------|--|---------------|-----------|---------|--|
| 1,00 | _urungun esimu | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 100.881 | 51.936 | 152.817 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1.387 | - | 1.387 | |
| 3 | Industri, Gas, dan Air | 62.253 | 61.135 | 123.388 | |
| 4 | Listrik, Gas, dan Air | 1.352 | - / | 1.352 | |
| 5 | Bangunan | 51.964 | 629 | 52.593 | |
| 6 | Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel | 73.417 | 91.268 | 164.685 | |
| 7 | Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | 19.260 | 1.592 | 20.852 | |
| 8 | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan | 7.813 | 4.105 | 11.918 | |

| No. | Lapangan Usaha | Jenis Kelamin | | |
|-----|---|---------------|-----------|---------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan | 59.946 | 41.300 | 101.246 |
| | Jumlah | 378.273 | 251.965 | 630.238 |

Sumber: BPS - Kabupaten Jombang Dalam Angka Tahun 2017

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Jombang terkait dengan budaya kerja masyarakat utamanya pekerjaan dibidang pertanian secara mayoritas memiliki tingkat keterampilan yang trampil dan berpengalaman, dan ada beberapa yang kurang terampil dan kurang berpengalaman, dan sebagian sedikit masyarakat yang malas bekerja. Dalam kondisi yang demikian, dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan bagi pemerintah terkait dengan program-program pengembangan dibidang pertanian yang sudah barang tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Secara garis besar kondisi budaya bekerja masyarakat dibidang pertanian dapat ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Kondisi Budaya Kerja Masyarakat Kabupaten Jombang di Bidang Pertanian

Sumber: Data Primer, Hasil Survei Bappeda Tahun 2015

B. Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Jombang

1. Visi dan Misi Pendidikan Kabupaten Jombang

Visi merupakan gambaran, cita-cita, kondisi ideal yang diharapkan, serta pencerminan komitmen masa depan Dinas Pendidikan yang akan dipilih dan diwujudkan pada periode 5 tahunan. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang adalah "Terwujudnya Pendidikan Yang Merata, Bermutu, Agamis Dan Berdaya Saing". Lebih jelasnya maka diuraikan makna dari visi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

 a) Dinas Pendidikan memiliki harapan bahwa ke depan ingin mewujudkan pendidikan yang merata, yaitu tersedia secara merata di seluruh wilayah

BRAWIJAY

Kabupaten Jombang, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, bermutu di semua jenjang dan jalur pendidikan.

- b) Agamis mengandung harapan bahwa pendidikan di Jombang akan membekali peserta didik dengan Imtak (Iman dan Taqwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta bengfungsinya agama sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktifitas peserta didik baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sosial masyarakat.
- c) Berdaya saing memiliki artian bahwa output pendidikan Kabupaten Jombang memiliki kemampuan, keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga mampu bersaing baik secara regional maupun global.
- d) Adapun kriteria pendidikan yang bermutu adalah berfungsinya secara maksimal komponen-komponen pendidikan meliputi; siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, proses pembelajaran, pengawasan/monev dan hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga menghasilkan output pendidikan yang berkualitas.

Misi merupakan maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan sebuah instansi dengan instansi lain serta mengidentifikasikan ruang lingkup program / kegiatan institansi, tindakan untuk mewujudkan visi instansi, artikulasi kemampuan instansi untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang antara lain:

- a) Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan kurikulum 2013;

BRAWIJAY

- c) Mengembangkan pendidikan keagamaan, budi pekerti dan pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumberdaya Manusia pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Meningkatkan kualitas kinerja tatakelola, akuntabiltas dan citra publik.

Adapun maksud dari masing-masing poin misi diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

| No. | Misi | Maksud | | | |
|-----|-----------------------|---|--|--|--|
| | Mewujudkan | Visi ini mengacu pada layanan prima | | | |
| | ketersediaan, | pendidikan yang dapat dicapai dengan | | | |
| | keterjangkauan dan | meningkatkan ketersediaan, memperluas | | | |
| 1 | kesetaraan kesempatan | keterjangkauan, meningkatkan | | | |
| | memperoleh | kualitas/mutu dan relevansi, mewujudkan | | | |
| | pendidikan yang | kesetaraan dan menjamin kepastian | | | |
| | berkualitas | memperoleh layanan pendidikan. | | | |
| | | Kurikulum, metode serta sistem Pendidikan | | | |
| | Meningkatkan kualitas | merupakan instrument strategis bagi upaya | | | |
| | Pendidikan | peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan | | | |
| 2 | berdasarkan kurikulum | kompetensi guru dan penyediaan sarana dan | | | |
| | 2013 | prasarana pendidikan hanya akan | | | |
| | | memberikan makna bagi peserta didik jika | | | |
| | | diarahkan pada pencapaian tujuan | | | |

| | dirumuskan dalam |
|--|----------------------|
| | |
| kurikulum. Untuk | menjamin Standar |
| kompetensi lulusan, | kegiatan belajar |
| mengajar harus meme | enuhi tujuh standar |
| lainnya yaitu standar | isi, standar proses, |
| standar pendidik dan te | enaga kependidikan, |
| standar sarana dan | prasarana, standar |
| pengelolaan, standar p | pembiayaan, standar |
| penilaian pendidikan. | 7) |
| Menyediakan layanan Mengembangkan | pendidikan yang |
| mempraktikkan pende Pendidikan | ekatan keterpaduan |
| antara ilmu agama, keagamaan, budi | sains, teknologi, |
| 3 pekerti dan pendidikan lingkungan, dan masya | arakat dengan iklim |
| belajar yang menyer karakter yang | nangkan, inspiratif, |
| saling mendukung dan berwawasan | n saling menghargai |
| lingkungan (keterpaduan IMTA) | K, IPTEK dan |
| SOSBUD) | |
| Meningkatkan kualitas Merupakan upaya menin | ngkatkan kinerja |
| dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kep | pendidikan melalui |
| 4 Sumberdaya Manusia motifasi dan pemenuhan | n hak sebagaimana |
| pendidik dan tenaga mestinya. Pendidik dan | tenaga kependidikan |
| kependidikan berhak memperoleh: | |

| No. | Misi | Maksud | |
|-----|--|--|--|
| | | Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja Pembinaan karier sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas | |
| | | hasil kekayaan intelektual | |
| 5 | Meningkatkan kualitas kinerja tatakelola, akuntabiltas dan citra publik | Tata kelola, akuntabilitas dan citra publik adalah kesatuan sistem tak terpisahkan dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan. dengan peningkatan kinerja di bidang ini, kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan akan tumbuh dengan tujuan akhir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Visi Dinas Pendidikan. | |

BRAWIJAY/

2. Tujuan dan Sasaran Pendidikan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yaitu sesuatu atau keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam lima tahun mendatang. Masing-masing Misi mengandung tujuan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jombang Tujuan ini mengandung beberapa sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang
 Pendidikan
 - Turunnya angka putus sekolah
 - Tercapainya rasio ideal jumlah Guru/Murid
 - Tercapainya rasio ideal jumlah Kelas/Murid
 - Terlaksananya pendidikan inklusi
 - Meningkatnya angka melek huruf
- b) Meningkatnya kualitas seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang. Tujuan ini mengandung beberapa sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan
 - Meningkatnya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan
- c) Membentuk peserta didik yang agamis berbudi pekerti dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. Tujuan ini mengandung sasaran yaitu terlaksananya implementasi kurikulum muatan lokal keagamaan, budi pekerti dan pendidikan karakter berwawasan lingkungan

BRAWIJAYA

- d) Meningkatnya kualitas SDM dan kesejahteraan guru yang sasarannya adalah meningkatnya kelayakan guru mengajar serta meningkatnya prosentase guru bersertifikasi
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

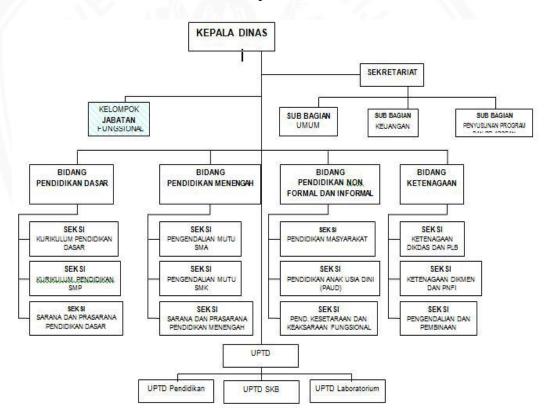
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati jombang nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang pendidikan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a) Pembinaan administrasi bidang ketatausahaan umum, keuangan dan pelaksanaan penyusunan program serta pelaporan;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, Pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan nonformal Informal (PNFI);
- c) Pelaksanaan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan nonformal Informal (PNFI);

MITAYA

- d) Pelaksanaan teknis bidang sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Pendidikan;
- e) Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pendidikan dasar,

 Pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan nonformal informal;
- f) Pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana Pendidikan dan kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan;
- g) Pelaksanaan koordinasi untuk mengadakan hubungan dan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder pendidikan.



Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 2014-2018

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang 2014-2018

4. Arah Kebijakan dan Strategi

Tabel 7. Kebijakan dan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|--|--|--|
| | Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan | Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa |
| Terwujudnya ketersediaan, | Turunnya angka putus sekolah | Peningkatan kualitas tenaga pendidik | Pelatihan kompetensi tenaga pendidik |
| keterjangkauan dan kesetaraan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jombang | Tercapainya rasio ideal jumlah Guru/Murid Tercapainya rasio ideal jumlah Kelas/Murid Terlayaninya Pendidikan Anak berkebutuhan Khusus Meningkatnya angka melek huruf | Peningkatan sarana prasarana di semua jenjang pendidikan | Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah |
| Meningkatnya kualitas | Meningkatnya | Peningkatan kualitas kurikulum | Pelatihan penyusunan kurikulum seluruh jenjang pendidikan |
| seluruh jenjang pendidikan di | g Nasional Seluruh | Pengembangan sekolah menuju SSN | Penyediaan biaya pengembangan sekolah menuju SSN |
| Kabupaten Jombang | Pendidikan | Memberikan motifasi belajar kepada siswa melalui pemberian beasiswa | Penyediaan beasiswa bagi peserta didik berprestasi |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | |
|--|--|---|---|--|
| | | Pembinaan minat bakat siswa | Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa. Pembinaan penguru OSIS Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi | |
| | Meningkatnya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang | Peningkatan daya apresiasi siswa terhadap seni budaya, baik local maupun nasional | Penyelenggaraan pekan seni, festival dan lomba seni siswa tingkat kabupaten/provinsi/nasi onal dan pembinaan peminat seni tradisional. | |
| 3 | Pendidikan | Fasilitasi Try Out dan UN | Fasilitasi Try Out dan UN bagi seluruh jenjang pendidikan | |
| | | Akreditasi sekolah Akreditasi sekolah WN bagi seluruh jenjang pendidika Penyelenggaraan akreditasi seluruh jenjang pendidika Kerjasama Sekola | | |
| | | Kerjasama pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri Pelatihan penyussunan dan penerapan | Kerjasama Sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri | |
| | 光 [] | | Fasilitasi calon wirausaha dan tenaga kerja dari SMK/SMA | |
| Membentuk peserta didik yang agamis | Terlaksananya implementasi kurikulum muatan | | Pelatihan penyusunan kurikulum untuk seluruh jenjang pendidikan | |
| berbudi pekerti | budi pekerti dan budi pekerti dan pendidikan karakter berwawasan | kurikulum muatan lokal keagamaan, budi pekerti | Fasilitasi sekolah adiwiyata | |
| dan berkarakter serta berwawasan lingkungan | | dan pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan | Fasilitasi lomba lingkungan sehat sekolah (LSS), UKS Fasilitasi lomba fragmen budi pekerti. | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|--|--|---|
| | | Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan guru | Pembinaan kelompok kerja Guru |
| Meningkatnya kualitas SDM dan kesejahteraan guru | Meningkatnya kelayakan guru mengajar | Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan | Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Peningkatan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi pembina OSIS |
| | A WILL | Pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan administrasi perkantoran |
| | | Memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur | Memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur |
| Mewujudkan tata kelola | Tersusunnya dokumen- | Peningkatan disiplin aparatur | Peningkatan disiplin aparatur |
| pemerintahan | dokumen | Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur |
| yang baik (good governance) | perencanaan dan pelaporan kinerja | Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan dinas pendidikan | Penyusunan dokumen perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan dinas pendidikan |
| | | Fasilitasi Jardiknas dan radio suara pendidikan | Fasilitasi Jardiknas dan radio suara pendidikan |

C. Penyajian Data Penelitian

1. Potensi Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang

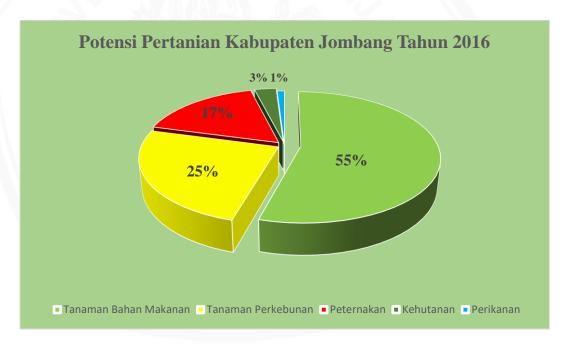
Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Chris Maya Rinelda selaku Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang dalam suatu kesempatan peneliti telah mewawancarai beliau, berikut isi wawancara peneliti dengan beliau:

"Kalau bicara soal potensi keunggulan daerah tidak terlepas dari sumber daya alam seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Di kabupaten Jombang ini potensi-potensi keunggulan lokal ada dalam dokumen SIDa (Sistem Inovasi Daerah). Durian bido dan kopi ekselsa menjadi keunggulan yang dimiliki oleh kabupaten jombang saat ini yang hasil produksinya berpusat di kecamatan Wonosalam. Kita (BAPPEDA) telah menerima berbagai masukan dari masyarakat-masyrakat dan yang menjadi prioritas untuk pengembangan potensi keunggulan lokal disini saat ini adalah durian bido dan kopi ekselsa itu.

a) Potensi Sektor Pertanian

Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan BPS Kabupaten Jombang Tahun 2014, penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian sawah dengan kisaran mencapai 43,21 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Beradsarkan data luas lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 80,45%, berpengairan teknis, 3,51% sawah ½ teknis, 3,12% sawah irigasi sederhana, 0,05% sawah irigasi desa dan 12,87% sawah tadah hujan.

Sedikitnya 42% lahan di wilayah Kabupaten Jombang digunakan sebagai area persawahan. Letaknya di bagian tengah wilayah Kabupaten dengan ketinggian 25-100 mdpl. Lokasi ini ditanami tanaman padi dan palawija seperti jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubu kayu. Komoditas unggulan tanaman pangan Kabupaten Jombang di tangan propinsi adalah padi, jagung, kedelai, dan ubu kayu. Besarnya produksi padi telah menempatkan Jombang sebagai daerah swasembada beras di Propinsi Jawa Timur. Secara garis besar potensi pertanian Kabupaten Jombang dapat ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Kondisi Potensi Pertanian Kabupaten Jomabang ditinjau dari PDRB-HB

Sumber: Data Sekunder, BAPPEDA Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016 diolah

Pada gambar 7. menunjukkan bahwa tanaman bahan makanan yang menjadi potensi paling dominan di Kabupaten Jombang yaitu mencapai 55% pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh tanaman perkebunan sebesar

25%, lalu peternakan 17%, kehutanan 3%, dan yang terakhir adalah perikanan dengan hanya 1%.

1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Komoditas pertanian sub sektor tanaman bahan makanan yang direncanakan akan dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang adalah padi dan jagung. Pada tahun 2016 jumlah produksi padi di Kabupaten Jombang mencapai 469.099ton padi dengan luas panen 77.773ha. Sedangkan perkembangan sub sektor tanaman pangan selain komoditas padi yang memiliki produktivitas tinggi lain adalah komoditas jagung dengan luas panen 31.627ha dan jumalah produksi mencapai 241.325ton jagung pada tahun 2016. Perkembangan produksi komoditas tanaman bahan makanan tersebut untuk lebih jelasnya dalam dilihat dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Perkembangan Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Jombang 2014-2016

| NO. | KOMODITAS | PRODUKSI (TON) | | |
|-----|---------------------------|----------------|---------|--------------|
| NO. | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Padi | 431.175 | 447.345 | 469.099 |
| 2 | Jagung | 233.087 | 211.164 | 241.325 |
| 3 | Kedelai | 10.822 | 9.747 | 6.429 |
| 4 | Kacang Tanah | 599 | 1.059 | 1.059 |
| 5 | Kacang Hijau | 83 | 229 | 132 |
| 6 | Ubi Kayu | 12.261 | 10.148 | 24.588 |
| 4 5 | Kacang Tanah Kacang Hijau | 599 83 | 1.059 | 1.059 132 |

| NO. | KOMODITAS | PR | PRODUKSI (TON) | | |
|-----|-----------|-------|----------------|-------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 7 | Ubi Jalar | 3.215 | 5.412 | 1.965 | |

Sumber: BPS - Kabupaten Jombang dalam Angka Tahun 2015, 2016, 2017

2) Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan. Perkembangan komoditas andalan sub sektor perkebunan di Kabupaten Jombang adalah komoditas tebu yang pada tahun 2016 jumlah produksinya mencapai 49.227 ton. Selain komoditas tebu, masih terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten Jombang, antara lain cengkeh yang produksinya ditahun 2016 sebesar 774 ton bunga kering dan kopi 761 ton biji kering.

Kawasan hutan di Kabupaten Jombang mencapai 30% dari total luas wilayah Kabupaten Jombang yang terdiri dari 4,44% hutan lindung, 75,66% hutan produksi, 14,58% suaka alam/hutan alam/taman nasional, dan 8,75% merupakan hutan rakyat dengan produksi hasil hutan berupa kayu dan getah pinus. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang tahun 2016, bahwa kawasan hutan

produksi di wilayah administrasi Kabupaten Jombang seluas 24.801,6 Ha, yang terbagi atas KPH Jombang seluas 12.705,3 Ha. Hutan lindung seluas 873,1 Ha. Sedangkan kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4 Ha dan Taman Nasional (Tahura) seluas 2.864,70 Ha. Perkembangan produksi tanaman perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016

| | | Pl | PRODUKSI (TON) | | | |
|-----|-----------|--------|----------------|--------|--|--|
| NO. | KOMODITAS | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | Tebu | 57.749 | 55.062 | 49.227 | | |
| 2 | Karet | 42 | 42 | 44 | | |
| 3 | Kakao | 284 | 323 | 467 | | |
| 4 | Cengkeh | 763 | 923 | 774 | | |
| 5 | Kopi | 857 | 933 | 761 | | |
| 6 | Kelapa | 611 | 656 | 652 | | |
| | | | | | | |

Sumber: BPS - Kabupaten Jombang dalam Angka Tahun 2015, 2016, 2017

3) Sub Sektor Peternakan

Prospek pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Jombang diarahkan sesuai dengan pengaturan pemanfaatan lahan atau kawasannya. Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada, yaitu:

BRAWIJAX

- Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu, Kabuh, Bareng dan Plandaan, sedangkan jenis sapi perah di Kecamatan Wonosalam. Ngoro, Diwek dan Mojoagung;
- Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara
 Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Kesamben,
 Tembelang, Kudu, Plandaan, Wonosalam dan Ngusikan;
- Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan, Kudu, Ngusikan dan Kabuh.

Perkembangan sub sektor peternakan (daging, telur, dan susu) menurut jumlah produksi tiap komoditas pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Jombang dapat di lihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Perkembangan Produksi Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016

| NO | VOLCODITA C | PRODUKSI | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| NO. | KOMODITAS | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| 1 | Daging (Kg) | | | | | | | |
| | Sapi | 3.399.256 | 3.477.200 | 3.854.400 | | | | |
| | Kambing | 343.069 | 363.773 | 416.724 | | | | |
| | Domba | 172.666 | 192.167 | 277.745 | | | | |
| | Babi | 3.099 | 3.570 | 2.468 | | | | |
| | Ayam Buras | 3.117.220 | 9.091.706 | 2.260.185 | | | | |
| | Ayam Petelur | 1.008.591 | 673.814 | 397.390 | | | | |

| NO. | KOMODITAS | | PRODUKSI | |
|-----|---------------|------------|------------|------------|
| NO. | KOMODITAS | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Ayam Pedaging | 21.371.966 | 9.765.529 | 11.697.187 |
| | Itik | 139.675 | 153.950 | 145.745 |
| 2 | Telur (Kg) | | | |
| | Ayam Buras | 914.721 | 980.653 | 961.559 |
| | Ayam Petelur | 12.356.612 | 12.991.368 | 12.459.018 |
| | Itik | 1.034.238 | 1.335.928 | 1.473.647 |
| | Puyuh | 102.000 | 86.640 | 105.540 |
| 3 | Susu (Liter) | | Y, | |
| | Sapi Perah | 8.435.028 | 9.091.706 | 9.320.170 |
| | Kambing Perah | 656.600 | 673.814 | - |

Sumber: BPS – Jawa Timur dalam Angka Tahun 2015, 2016, 2017

b) Potensi Sektor Industri

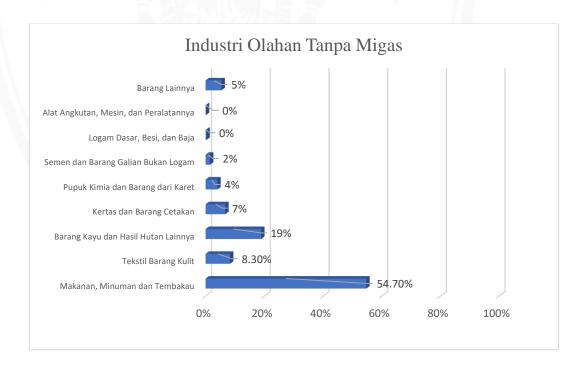
Pengembangan kegiatan industri berdasarkan skala kegiatan terdiri dari industri kecil, menengah, dan besar. Kegiatan industri skala menengah dan besar di Kabupaten Jombang diarahkan di wilayah Kecamatan Ploso dan Kecamatan Bandarkedungmulyo yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap:

- Menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BRAWIJAYA

- Mendorong perkembangan potensi local khusunya sector pertanian dan perkebunan
- Memberi dampak terhadap sektor perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Kegiatan agroindustri, yaitu kegiatan yang bersinergi dengan sektor pertanian dan perkebunan sehingga dapat meningkatkan niali tambah produk-produk unggulan di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2016 Kabupaten Jombang masih bertumpu pada industri pengolahan makanan, minuman dan olahan produk hasil pertanian dan perkebunan dalam skala industri kecil-menengah. Secara garis besar kondisi industri olahan Kabupaten Jombang dapat ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Kondisi Industri Olahan Kabupaten Jombang Tahun 2016

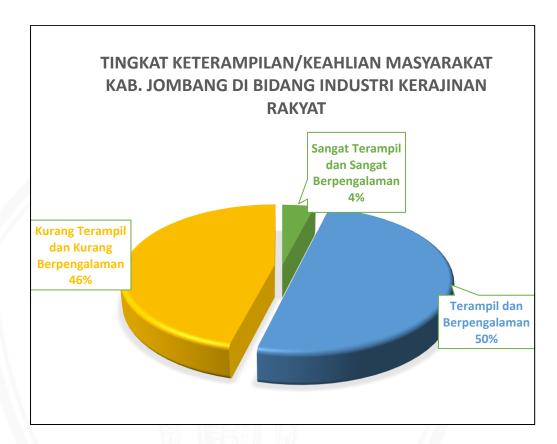
Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Laporan Akhir SIDa 2016

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Budi Winarno selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang mengenai potensi industri yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang. Berikut isi dari wawancara dengan beliau:

"Potensi dibidang industri olahan secara mayoritas didominasi oleh olahan makanan minuman dan hasil tembakau, barang dari kayu hasil hutan dan lainnya, menunjukkan, banyak industri mebel yang sudah menjadi sentra pengembangan mebel dan sudah membudaya dimasyarakat. Catakgayam merupakan desa rintisan usaha meuble yang berbasis home industri, hingga sekarang mayoritas penduduknya bermatapencaharian di bidang home industri meuble yang tersebar sampai ke wilayah di sekitar desa dan masih dekat dengan kawasan makam Gusdur di Kecamatan Diwek. Di seputaran kawasan makam Gusdur juga terdapat sentra manikmanik di Kecamatan Gudo yang potensial untuk dikembangkan menjadi satu paket dengan wisata religi makam Gusdur. Selain itu, masih terkait dengan industri kerajinan rakyat, Kabupaten Jombang di Kecamatan Mojowarno juga terdapat sentra industri logam yang produknya sudah ekspor ke Nepal, Amerika, Australia, dan Belanda dan beberapa negara lainnya, dengan demikian industri kerajinan rakyat juga merupakan salah satu potensi unggulan yang bisa diangkat menjadi daya saing daerah."

Kondisi sosial masyarakat yang bergerak dibidang industri kerajinan rakyat dapat ditunjukkan bahwa, secara mayoritas memiliki ketrampilan dan berpengalaman dikomunitas masyarakat yang bergerak diindustri kerajinan rakyat. namun juga relatif besar yang kondisinya masih kurang terampil dan kurang berpengalaman. Dengan demikian membutuhkan pelatihan dan pembinaan serta pemagangan ditempat industri kerajinan yang sudah berjalan dengan baik. Disisi lain ada masyarakat yang sangat

terampil dan berpengalaman meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Secara garis besar kondisi tingkat keterampilan dibidang industri kerajinan rakyat dapat ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Kondisi Masyarakat Kabupaten Jombang di Bidang Industri Kerajinan Rakyat

Sumber: Data Primer, Hasil Suvei Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2016

2. Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah yang memiliki berbagai potensi daerah yang dapat dikembangkan guna

mempercepat kesejahteraan dan peningkatan perekonomian rakyat melalui program Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). Pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam perencanaan program PBKL telah bekerjasama dengan beberapa dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Dalam beberapa kesempatan peniliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kasi Kurikulum di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang mengenai perencanaan program PBKL, berikut isi dari wawancara dengan Bapak Jumadi:

"Sesuai dengan Perda Kabupaten Jombang No. No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal IX Bab 18 Ayat 3 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal dalam Pasal 1 Ayat 4. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang adalah JOMBANG AGAMIS. Program ini didasari oleh masukan dari masyarakat terutama para orang tua wali murid yang mengingkan siswa-siswi setelah lulus dari pendidikan dasar agar mampu untuk langsung bermasyarakat seperti menjadi muadzin di mushola-mushola di kampung atau diharapkan untuk mampu lancar membaca alquran dan hafal doa sehari-hari"

Berdasarakan wawancara diatas dapat diketahui bahwa program PBKL di Kabupaten Jombang menurut pemerintah daerah yang melalui dians pendidikan adalah "JOMBANG AGAMIS". Namun, program jombang agamis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai program PBKL karena tidak sesuai dengan konsep sesungguhnya dari pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dimana didalamnya mencakup ciri khas daerah, potensi alam daerah, dan kebutuhan daerah. Output dari program PBKL itu sendiri adalah untuk menciptakan SDM yang mengetahui dan mampu

untuk mengelola hasil produksi keunggulan daerah serta mempercepat peningkatan perekonomian rakyat yang dapat mensejahterakan masyarakat di daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Maupun Pemerintah Daerah Mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyaraakat serta peningkatan daya saing daerah.
- b) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diantaranya adalah:
 - BAB III pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
 - BAB X pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat (3) butir c menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang

pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan.

- BAB X pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i) dan muatan lokal (butir j).
- BAB XIV pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- c) Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dalam usaha meningkatkan daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, yang ditunjukkan melalui terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia.
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, diantaranya adalah:
 - BAB III Pasal 14 Ayat 1 bahwa kurikulum untuk SMP/MTS/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
 - BAB VIII pasal 60 butir (i) menyatakan bahwa Peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global.
 - BAB XV pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan

dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

- e) Kebijakan Pendidikan Kabupaten Jombang dalam Grand Design Pendidikan atau Perencanaan Jangka Panjang 2005-2025 adalah memperluas akses kebutuhan Pendidikan dengan keunggulan lokal bagi siswa SMK yang dilaksanakan melalui penambahan program Pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal IX Bab 18 Ayat 3 disebutkan bahwa muatan lokal sebagaimana dimaksud adalah mata pelajaran muatan lokal keagamaan.
- g) Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal dalam Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa mata pelajaran muatan lokal di Kabupaten Jombang adalah Jombang Agamis.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pembangunan jangka panjang dalam usaha mewujudkan sasaran pokok meningkatkan daya saing bangsa, kebijakan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan pendidikan, pengembangan wilayah, kebijakan pengembangan ekonomi terdapat relevansi kebijakan, yaitu: Melaksanakan pengembangan keunggulan lokal yang dapat memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan

kemakmuran rakyat, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkannya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui suatu program pendidikan berbasis keunggulan lokal yang relevan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja.

4. Sumber Daya yang Mendukung Terlaksananya Proram Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang

Dalam kesempatan lain peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jumadi terkait dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung dalam terlaksanya program PBKL di Kabupaten Jombang, meliputi sumber pembiayaan, SDM yang melaksanakan program tersebut, serta fasilitas penunjang didalam progam PBKL. Berikut isi wawancara dengan beliau:

"Program Jombang Agamis yang menjadi program unggulan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai kegiatan didalamnya. Sumber pembiayaannya diambil dari APBD Jombang yang ada dalam dokumen rencana kerja dikdas ini. Kemudian kita melaksanakan pelatihan 3-5 kali per tahun gunanya adalah untuk melatih gurunya supaya sesuai dengan tujuan dari program Jombang Agamis ini, serta kita berkerjasama dengan beberapa pondok pesantren untuk dapat mendatangkan ustad-ustad dalam pelatihan tersebut. Jumlah gurunya serta muridnya juga ada dalam dokumen rencana kerja dikdas ini."

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti diatas bahwa sumber daya yang mendukung program PBKL di Kabupaten Jombang semuanya tercantum pada dokumen rencana kerja dinas pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2016.

a) Sumber Pembiayaan atau Anggaran Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang

Pada tahun 2016, anggaran bidang Pendidikan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 30.401.867.790,- untuk membiayai 18 kegiatan dengan 57

BRAWIJAY

sub kegiatan. Adapun rincian dana yang digunakan untuk kurikulum Jombang Agamis adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Anggaran Kurikulum Jombang Agamis Tahun 2016

| No. | Kurikulum Jombang Agamis | Dana |
|-----|--------------------------|-------------|
| 1. | Jombang Agamis SD | 117.086.375 |
| 2. | Jombang Agamis SMP | 112.255.000 |
| 3. | Jombang Agamis SMA | 134.027.500 |
| | Total | 363.368.875 |

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2016

Pelaku atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mendukung Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang

Indikator pendidikan yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dimana pada tingkat SD/MI (usia 7-12 tahun) pada tahun 2012 naik menjadi 94,16 tahun 2013 naik menjadi 95,37, tahun 2014 naik menjadi 95,57, tahun 2015 naik menjadi 95,75 dan pada tahun 2016 naik menjadi 95,95.

Peningkatan APM pada tingkat pendidikan ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan APM per Kecamatan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 12. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016 Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

| | | | SD/MI | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|--|-------|---|--|-------|---|--|-------|--|
| No | Kecamatan | Jumlah murid usia 7- 12 thn | Jumlah pendi- dik usia 7- 12 thn | APM | Jumlah murid usia 13-15 thn | Jumlah pendi- dik usia 13-15 thn | APM | Jumlah murid usia 16-18 thn | Jumlah pendidik usia 16- 18 thn | APM | |
| 1 | Bandar Km | 4.020 | 4.848 | 84,63 | 1.484 | 1.645 | 87,30 | 847 | 2.256 | 38,95 | |
| 2 | Perak | 4.993 | 4.742 | 105,5 | 3.565 | 3.323 | 91,49 | 3.236 | 2.731 | 109,1 | |
| 3 | Gudo | 4.530 | 5.225 | 86,92 | 1.266 | 2.077 | 71,80 | 556 | 2.657 | 21,71 | |
| 4 | Diwek | 9.598 | 9.568 | 100,2 | 7.267 | 5.672 | 124,4 | 5.431 | 4.769 | 114,8 | |
| 5 | Ngoro | 7.128 | 7.749 | 90,84 | 3.594 | 4.089 | 78,82 | 2.515 | 3.716 | 67,66 | |

| | | | SD/MI | | S | SMP/MTs | | SMA/MA/SMK | | | |
|----|------------|--------------------------------------|--|-------|---|--|-------|---|--|-------|--|
| No | Kecamatan | Jumlah murid usia 7- 12 thn | Jumlah pendi- dik usia 7- 12 thn | APM | Jumlah murid usia 13-15 thn | Jumlah pendi- dik usia 13-15 thn | APM | Jumlah murid usia 16-18 thn | Jumlah pendidik usia 16- 18 thn | APM | |
| 6 | Mojowarno | 7.883 | 9.067 | 88,77 | 3.143 | 3.259 | 77,58 | 599 | 4.466 | 13,41 | |
| 7 | Bareng | 4.677 | 5.463 | 85,08 | 2.027 | 2.130 | 86,49 | 586 | 2.853 | 20,53 | |
| 8 | Wonosalam | 2.895 | 3.260 | 88,03 | 1.187 | 1.405 | 73,26 | 503 | 1.794 | 28,13 | |
| 9 | Mojoagung | 7.473 | 8.044 | 92,64 | 4.330 | 4.152 | 93,43 | 4.026 | 3.956 | 99,49 | |
| 10 | Sumobito | 6.635 | 7.848 | 84,06 | 2.871 | 3.345 | 74,18 | 1.082 | 3.804 | 28,44 | |
| 11 | Jogoroto | 6.379 | 6.682 | 90,90 | 3.595 | 3.877 | 95,93 | 1.901 | 2.707 | 70,20 | |
| 12 | Peterongan | 5.602 | 5.541 | 101,1 | 4.530 | 3.683 | 94,82 | 3.678 | 2.875 | 127,8 | |
| 13 | Jombang | 14.009 | 8.618 | 163,1 | 9.781 | 8.918 | 127,2 | 15.870 | 6.455 | 246,3 | |
| 14 | Megaluh | 3.140 | 3.283 | 91,50 | 1.293 | 1.748 | 76,33 | 232 | 1.538 | 15,07 | |
| 15 | Tembelang | 4.689 | 4.687 | 99,74 | 2.631 | 3.366 | 71,55 | 872 | 1.935 | 45,04 | |
| 16 | Kesamben | 5.120 | 6.075 | 82,02 | 1.963 | 2.248 | 77,59 | 940 | 3.123 | 30,09 | |
| 17 | Kudu | 2.375 | 2.689 | 89,28 | 841 | 1.407 | 63,14 | 722 | 1.723 | 55,80 | |
| 18 | Ploso | 3.140 | 3.623 | 87,49 | 1.369 | 2.075 | 52,17 | 2.614 | 2.361 | 112,1 | |
| 19 | Kabuh | 2.988 | 3.492 | 84,49 | 1.082 | 1.590 | 60,39 | 548 | 2.212 | 24,83 | |
| 20 | Plandaan | 2.687 | 3.202 | 80,97 | 1.242 | 1.682 | 68,09 | 347 | 2.053 | 16,89 | |
| 21 | Ngusikan | 1.759 | 1.970 | 84,36 | 1.191 | 1.719 | 66,92 | 331 | 1.238 | 26,89 | |
| | Jumlah | 111.720 | 115.676 | 96,58 | 60.252 | 63.410 | 90,41 | 47.463 | 61.222 | 77,58 | |

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Jombang Tahun 2016

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat mendukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang

Tabel 13. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016

| No. | Jenjang | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 110. | Pendidikan | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2010 |
| 1 | SD/MI | | | 7 | | |
| | Jumlah siswa | 125.712 | 126.653 | 127.556 | 123.542 | 123.015 |
| \\ | bersekolah di | 3 18 7 | | | // | |
| \mathbb{N} | SD/MI | | | | // | |
| | Jumlah penduduk | 119.760 | 119.610 | 120.460 | 115.676 | 115.857 |
| | kelompok usia 7- | " 'A 1 | | | | |
| | 12 tahun | | | | | |
| | APK SD/MI | 104,97 | 105,89 | 105,89 | 106,80 | 106,18 |
| 2 | SMP/MTs | | | | II. | |
| | Jumlah siswa | 65.231 | 64.220 | 67.445 | 66.269 | 69.225 |
| | bersekolah di | | | | | |
| | SMP/MTs | | | | | |
| | Jumlah penduduk | 63.877 | 63.377 | 65.322 | 63.410 | 67.046 |
| | kelompok usia | | | | | |
| | 13-15 tahun | | | | | |
| | APK SMP/MTs | 102,12 | 101,33 | 103,25 | 104,51 | 113,25 |

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Jombang Tahun 2016

Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD, namun dengan adanya peningkatan APK pada tingkat SMP dan SMA yang berlangsung secara kontinyu dan signifikan ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Dengan tingkat pendidikan yang baik masyarakat diharapkan mampu untuk dapat mengembangkan potensipotensi daerah yang ada dan mampu membuka usaha-usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel 14. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Jombang Menurut Kecamatan 2016

| | | | SD/MI | | SMP/MTs | | | SMA/MA/SMK | | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------------|--|
| No | Kecamatan | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 | 6 | 7 | 8=6/7 | 9 | 10 | 11=9/ 10 | |
| 1 | Bandar Kdm | 370 | 4.524 | 12 | 121 | 1.669 | 14 | 80 | 1.197 | 15 | |
| 2 | Perak | 386 | 5.340 | 14 | 293 | 3.845 | 13 | 237 | 4.524 | 19 | |
| 3 | Gudo | 369 | 4.950 | 13 | 118 | 1.529 | 13 | 62 | 720 | 12 | |
| 4 | Diwek | 866 | 10.581 | 12 | 765 | 7.876 | 10 | 712 | 6.691 | 9 | |

| | | | SD/MI | | S | SMP/MTs | | SMA/MA/SMK | | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-------|--|
| No | Kecamatan | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | |
| 5 | Ngoro | 628 | 7.837 | 13 | 404 | 4.121 | 10 | 371 | 3.232 | 9 | |
| 6 | Mojowarno | 668 | 8.982 | 13 | 404 | 3.531 | 9 | 161 | 865 | 5 | |
| 7 | Bareng | 399 | 5.230 | 15 | 161 | 2.170 | 13 | 60 | 681 | 11 | |
| 8 | Wonosalam | 252 | 3.235 | 14 | 108 | 1.247 | 12 | 62 | 543 | 9 | |
| 9 | Mojoagung | 545 | 8.119 | 12 | 385 | 4.896 | 13 | 429 | 5.333 | 12 | |
| 10 | Somobito | 555 | 7.518 | 14 | 276 | 3.066 | 11 | 129 | 1.493 | 12 | |
| 11 | Jogoroto | 559 | 6.618 | 12 | 476 | 4.566 | 10 | 226 | 2.209 | 10 | |
| 12 | Peterongan | 436 | 6.171 | 14 | 391 | 4.919 | 13 | 528 | 4.893 | 9 | |
| 13 | Jombang | 1.045 | 15.417 | 15 | 991 | 12.283 | 12 | 1.674 | 20.571 | 12 | |
| 14 | Megaluh | 330 | 3.393 | 10 | 137 | 1.595 | 12 | 47 | 294 | 6 | |
| 15 | Tembelang | 424 | 5.155 | 12 | 263 | 3.193 | 12 | 131 | 1.090 | 8 | |
| 16 | Kesamben | 421 | 5.578 | 13 | 181 | 2.110 | 12 | 117 | 1.122 | 10 | |
| 17 | Kudu | 225 | 2.632 | 12 | 87 | 963 | 11 | 78 | 923 | 12 | |
| 18 | Ploso | 267 | 3.472 | 13 | 124 | 1.582 | 13 | 212 | 2.920 | 14 | |
| 19 | Kabuh | 277 | 3.279 | 12 | 92 | 1.264 | 14 | 60 | 799 | 13 | |
| 20 | Plandaan | 316 | 2.996 | 9 | 125 | 1.403 | 11 | 49 | 408 | 8 | |
| 21 | Ngusikan | 174 | 1.988 | 11 | 112 | 1.397 | 12 | 47 | 410 | 9 | |
| | Jumlah | 9.512 | 123.015 | 13 | 6.014 | 69.225 | 12 | 5.472 | 60.918 | 11 | |

Sumber: Recana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Jombang Tahun 2016

c) Ketersediaan Fasilitas Penunjang didalam Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah perjumlah penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Peneliti yang telah melaksanakan wawancara dengan Bapak Ahmad Rofiq Ashari selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasaran di Dinas Pendidikan juga berpendapat, bahwa:

> "Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk tingkat menengah dalam 5 tahun terakhir mengalami naik turun untuk tahun 2014 naik dan kembali turun ditahun 2015. Hal ini menunjukkan pelayanan dibidang pendidikan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana gedung sekolah yang mampu menampung penduduk usia sekolah dalam menikmati pelayanan pendidikan perlu ditingkatkan."

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah Kabupaten Jombang pada 5 tahun terakhir (2012-2016) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 15. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Jombang Tahun 2012-2016

| No. | Jenjang Pendidikan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | SD/MI | | 价值 | | - // | |
| | Jumlah gedung sekolah | 832 | 822 | 824 | 821 | 822 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 tahun | 119.760 | 119.610 | 120.460 | 115.676 | 115.676 |
| | Rasio | 144 | 146 | 146 | 141 | 140 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| | Jumlah gedung sekolah | 243 | 237 | 241 | 243 | 246 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 63.877 | 63.377 | 65.322 | 63.410 | 63.410 |
| | Rasio | 263 | 267 | 271 | 261 | 257 |

| No. | Jenjang Pendidikan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| | Jumlah gedung sekolah | 181 | 178 | 181 | 184 | 185 |
| | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 57.697 | 57.197 | 61.046 | 61.222 | 61.222 |
| | Rasio | 318,77 | 321,33 | 337 | 333 | 330 |

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Jombang Tahun 2016

Menurut data diatas perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang naik untuk SD/MI sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2013 yakni dari 63 % meningkat menjadi 93,13% ditahun 2015. Sedangkan untuk SMP/MTs menunjukkan tren yang menggembirakan yakni meningkat dari 76,61% pada 2012 naik menjadi 82,58 % pada tahun 2013, lalu meningkat menjadi 83,99 % pada tahun 2014, dan tahun 2015 menjadi 97,68%, sedangkan tahun 2016 sedikit mengalami penurunan menjadi 96,66%. Adapun untuk SMA/SMK/MA cenderung stabil yakni 91,95% pada tahun 2012 turun sedikit menjadi 90,21% pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 naik lagi menjadi 91,25% dan ditahun 2015 tetap 91,25%, sedangkan ditahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 94,72%. Terjadinya kenaikan pada SD/MI tersebut banyak dipengaruhi pelaksanaan rehabilitasi gedung SD dan SMP pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

BRAWIJAYA

D. Analisis Data Penelitian

Analisis Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang Menggunakan Metode Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) dilakukan untuk mengetahui sektor dan sub sektor basis ekonomi yang juga merupakan sektor dan sub sektor tersebut sebagai sektor dan sub sektor unggulan di Kabupaten Jombang dengan cara membandingkan besarnya peran suatu sektor dan sub sektor di Kabupaten Jombang terhadap besarnya sektor dan sub sektor tersebut di Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan nilai jumlah produksi tiap komoditas dari tahun 2014-2016.

Apabila nilai LQ > 1 artinya sektor dan sub sektor tersebut merupakan sektor dan sub sektor basis ekonomi juga sebagai sektor dan sub sektor keunggulan lokal di Kabupaten Jombang. Sedangkan, jika nilai LQ < 1 artinya sektor dan sub sektor tersebut bukan merupakan sektor dan sub sektor basis keunggulan lokal. Secara operasional metode LQ dituliskan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Dimana:

Si : jumlah produksi komoditas sektor-i Kabupaten Jombang
 S : jumlah produksi komoditas total Kabupaten Jombang
 Ni : jumlah produksi komoditas sektor-i Propinsi Jawa Timur
 N : jumlah produksi komoditas total Propinsi Jawa Timur

Untuk lebih jelasnya komoditas unggulan Kabupaten Jombang dapat diketahui melalui tabel berikut:





Tabel 16. Analisis *Location Quotient* (LQ) Komoditas Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016

| No. | Komoditas | Jombang | | | | Jawa Timur | | | Nilai LQ | Keterangan | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------|----------|------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Padi | 431.175 | 447.345 | 469.099 | 11.785.464 | 12.565.824 | 12.903.595 | 1,17 | 1,19 | 1,12 | Basis |
| 2 | Jagung | 233.087 | 211.164 | 241.325 | 5.737.382 | 6.131.613 | 6.278.264 | 1,29 | 1,15 | 1,18 | Basis |
| 3 | Kedelai | 10.822 | 9.747 | 6.429 | 355.464 | 344.998 | 274.317 | 0,97 | 0,94 | 0,72 | Non Basis |
| 4 | Kacang Tanah | 599 | 1.059 | 1.059 | 188.467 | 191.579 | 175.925 | 0,10 | 0,18 | 0,19 | Non Basis |
| 5 | Kacang Hijau | 83 | 229 | 132 | 60.310 | 67.821 | 58.805 | 0,44 | 0,11 | 0,07 | Non Basis |
| 6 | Ubi Kayu | 12.261 | 10.148 | 24.588 | 3.635.454 | 3.161.573 | 2.924.933 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | Non Basis |
| 7 | Ubi Jalar | 3.215 | 5.412 | 1.965 | 312.421 | 350.516 | 288.039 | 0,33 | 0,51 | 0,21 | Non Basis |
| | Jumlah | 691.242 | 685.104 | 744.597 | 22.020.683 | 22.813.924 | 22.903.878 | | | | |

Tabel 17. Analisis *Location Quotient* (LQ) Komoditas Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016

| No. | Komoditas | Jombang | | | Jawa Timur | | | Nilai LQ | | | Keterangan |
|-----|-----------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | Tebu | 57.749 | 55.062 | 49.227 | 1.260.632 | 1.092.208 | 1.035.157 | 1.25 | 1.26 | 1.31 | Basis |
| 2 | Karet | 42 | 42 | 44 | 27.850 | 27.622 | 23.218 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | Non Basis |
| 3 | Kakao | 284 | 323 | 467 | 30.299 | 17.952 | 31.666 | 0.25 | 0.45 | 0.40 | Non Basis |
| 4 | Cengkeh | 763 | 923 | 774 | 9.804 | 9.927 | 10.769 | 2.12 | 2.33 | 1.97 | Basis |
| 5 | Kopi | 857 | 933 | 761 | 58.136 | 34.166 | 63.635 | 0.40 | 0.68 | 0.33 | Non Basis |
| 6 | Kelapa | 611 | 656 | 652 | 252.672 | 268.247 | 260.664 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | Non Basis |
| | Jumlah | 60306 | 57939 | 51925 | 1639393 | 1450122 | 1425109 | | | | |

Tabel 18. Analisis *Location Quotient* (LQ) Komoditas Sub Sektor Peternakan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2016

| No. | Komoditas | Jombang | | | Jawa Timur | | | Nilai LQ | | | Vatarongon |
|-----|------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|----------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Keterangan |
| 1 | Daging (Kg) | | .0 | SII | | 1/2. | | | | | |
| | Sapi | 3.399.256 | 3.477.200 | 3.854.400 | 97.908.025 | 95.430.982 | 101.729.081 | 0,46 | 1,66 | 0,84 | Non Basis |
| | Kambing | 343.069 | 363.773 | 416.724 | 16.621.839 | 16.465.385 | 17.950.343 | 0,27 | 1,01 | 0,51 | Non Basis |
| | Domba | 172.666 | 192.167 | 277.745 | 5.782.948 | 5.703.408 | 7.290.949 | 0,39 | 1,53 | 0,84 | Non Basis |
| | Babi | 3.099 | 3.570 | 2.468 | 3.159.338 | 3.072.818 | 3.579.540 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | Non Basis |
| | Ayam Buras | 3.117.220 | 9.091.706 | 2.260.185 | 37.199.457 | 472.212.765 | 31.566.818 | 1,11 | 0,88 | 1,59 | Non Basis |
| | Ayam Petelur | 1.008.591 | 673.814 | 397.390 | 25.726.191 | 4.628.458 | 33.105.539 | 0,52 | 6,63 | 0,27 | Non Basis |
| | Ayam Pedaging | 21.371.966 | 9.765.529 | 11.697.187 | 198.016.239 | 476.841.223 | 219.833.235 | 1,42 | 0,93 | 1,18 | Non Basis |
| | Itik | 139.675 | 153.950 | 145.745 | 5.647.749 | 5.972.686 | 7.385.604 | 0,33 | 1,17 | 0,44 | Non Basis |
| | Jumlah | 29.555.542 | 23.721.709 | 19.051.844 | 390.061.786 | 1.080.327.725 | 422.441.109 | | | | |
| 2 | Telur (Kg) | | | 1/12 | | | | | | | |
| | Ayam Buras | 914.721 | 980.653 | 961.559 | 19.246.616 | 20.262.252 | 20.764.436 | 1,14 | 1,41 | 1,57 | Basis |
| | Ayam Petelur | 12.356.612 | 12.991.368 | 12.459.018 | 291.399.203 | 390.055.424 | 445.792.694 | 1,02 | 0,97 | 0,95 | Non Basis |
| | Itik | 1.034.238 | 1.335.928 | 1.473.647 | 32.132.243 | 34.311.016 | 36.814.294 | 0,77 | 1,13 | 1,35 | Non Basis |
| | Puyuh | 102.000 | 86.640 | 105.540 | 3.325.090 | 3.390.938 | 3.873.722 | 0,74 | 0,74 | 0,92 | Non Basis |
| | Jumlah | 14.407.571 | 15.394.589 | 14.999.764 | 346.103.152 | 448.019.630 | 507.245.146 | | | | |

| No. | Komoditas | Jombang | | | Jawa Timur | | | Nilai LQ | | | Votenengen |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|------|------|------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Keterangan |
| 2 | Susu | | | | | | | | | | |
| 3 | (Liter) | | | | | | | | | | |
| | Sapi Perah | 8.435.028 | 9.091.706 | 9.320.170 | 426.253.896 | 472.212.765 | 492.460.620 | 0,94 | 0,94 | 1,01 | Non Basis |
| | Kambing | 656,600 | 673.814 | CITA | 4.983.634 | 4.628.458 | 3.805.296 | 6,31 | 7 11 | 0.00 | Non Basis |
| | Perah | 030.000 | 075.014 | | 4.703.034 | 4.020.430 | 3.003.290 | 0,51 | /,11 | 0,00 | Non Dasis |
| | Jumlah | 9.091.628 | 9.765.520 | 9.320.170 | 431.192.530 | 476.841.223 | 496.310.916 | | | | |

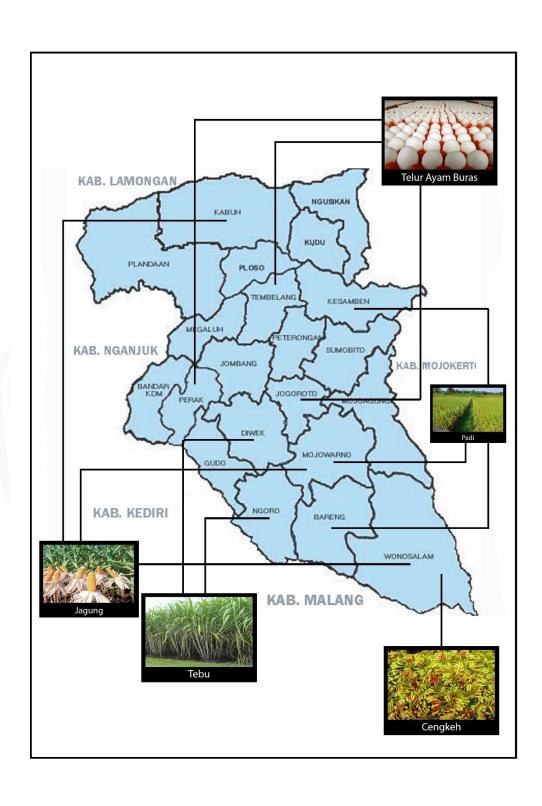
Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga kriteria yaitu:

- LQ > 1 artinya komoditas tersebut menjadi basis keunggulan atau menjadi sumber pertumbuhan. Keunggulan memiliki komoditas komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan tetapi juga dapat di ekspor keluar wilayah.
- 2) LQ = 1 artinya komoditas itu tergolong nonbasis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
- 3) LQ < 1 artinya komoditas ini juga termasuk nonbasis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari daerah lain.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa sektor komoditas yang menjadi keunggulan lokal di Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor bahan makanan komoditas padi dan jagung yang mempunya nilai LQ > 1 selama 3 tahun dari tahun 2014-2016. Sektor lain yang menjadi keunggulan lokal di Kabupaten Jombang adalah sub sektor perkebunan komoditas tebu dan cengkeh dengan nilai LQ > 1 selama tahun 2014-2016. Pada sub sektor peternakan hanya terdapat satu komoditas yang mimiliki nilai LQ > 1 yaitu telur ayam buras yang menjadi komoditas keunggulan lokal di Kabupaten Jombang. Sedangkan komoditas lain di sub sektor peternakan seperti daging (sapi, kambing, dan domba), telur (ayam petelur dan itik), dan susu kambing tidak dapat dikatakan sebagai keunggulan lokal di Kabupaten Jombang karena nilai LQ > 1 hanya ada pada beberapa tahun

saja. Komoditas yang menghasilkan nilai LQ > 1 merupakan standar normatif untuk ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Sebaran keunggulan di Kabupaten Jombang terdapat pada beberapa Kecamatan, yaitu:

- 1) Produksi komoditas padi terbesar terdapat di Kecamatan Mojowarno dengan jumlah produksi padi sebesar 40.429 ton, Kecamatan Bareng (33.940 ton), dan Kecamatan Kesamben (33.672 ton) pada tahun 2016.
- Produksi komoditas jagung terbesar terdapat di Kecamatan Mojowarno dengan jumlah produksi jagung sebesar 28.323 ton, Kecamatan Kabuh (21.989 ton), dan Kecamatan Wonosalam (20.557 ton) pada tahun 2016.
- Produksi komoditas tebu terbesar terdapat di Kecamatan Diwek dengan jumlah produksi tebu sebesar 12.008 ton, Kecamatan Ngoro (10.706 ton) pada tahun 2016.
- 4) Produksi komoditas cengkeh terbesar terdapat di Kecamatan Wonosalam dengan jumlah produksi cengkeh sebesar 501 ton pada tahun 2016.
- Produksi komoditas telur ayam buras terbesar terdapat di Kecamatan Tembelang, Jogoroto, dan Perak.



Gambar 10. Foto Peta Potensi Komoditas Keunggulan Lokal di Kabupaten Jombang Tiap Kecamatan

2. Analisis Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang

Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) merupakan salah satu terobosan penting dalam dunia pendidikan. Setiap daerah berhak untuk dapat mengelola keunggulan yang dimiliki di daerahnya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu daerah yang sedang mengembangakan program pendidikan keunggulan lokal dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 4 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2016 Bab IX Pasal 18 Ayat 3 tentang penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa keunggulan lokal sebagaimana dimaksud adalah mata pelajaran keunggulan lokal keagamaan. Peraturan ini yang mendasari terbuatnya program kerja dari dinas pendidikan Kabupaten Jombang yang disebut program Jombang Agamis.

Berdasarkan analisis nilai *Location Quotient* (LQ) terdapat 5 komoditas unnggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang yaitu padi, jagung, tebu, cengkeh, dan telur ayam buras. Namun, masalah yang terjadi adalah kesalahan pemahaman dari pemerintah daerah Kabupaten Jombang pada khususnya pembuat kebijakan tentang pengertian keunggulan lokal yang sesungguhnya. Keadaan ini memunculkan berbagai potensi masalah yang terjadi pada dunia pendidikan khususnya mengenai program pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- Kesalahan pemahaman konsep keunggulan lokal yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Jombang salah dalam menerapkan program mengenai pendidikan berbasis keunggulan lokal. Cara menetapkannya pun bukan melalui analisis mendalam namun berdasarkan usulan dari masyarakat sekitar.
- 2) Belum adanya komoditas yang direncanakan akan dikembangkan sebagai komoditas unggulan dan belum adanya faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang.
- 3) Kompetensi keahlian berbasis keunggulan lokal SMK di Kabupaten Jombang yang ada sampai dengan tahun ajaran 2016-2017 adalah Keahlian Agribisnis dan Tanaman Perkebunan (KATP) yang diselenggarakan di SMK Negeri Wonosalam dan SMK Negeri Kudu. Kompetensi keahlian ini kurang diminati oleh masyarakat sekitar.
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang direkomendasikan untuk menyelenggarakan Pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang, yaitu: SMKN Wonosalam, SMKN Kudu, SMKN Gudo adalah merupakan sekolah yang sulit diakses masyarakat karena jaraknya jauh dari pusat kabupaten dan tidak adanya jalur transportasi yang mudah menuju lokasi sekolah.
- Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008 sehingga belum

- dapat mendukung secara efektif tercapainya kompetensi siswa sesuai standar pendidikan yang ditetapkan.
- 6) Guru/Pengajar SMK di Kabupaten Jombang masih ada yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan disamping itu tidak memiliki pengalaman praktis secara langsung sesuai dengan bidang yang diajarnya.
- 7) Biaya Pendidikan SMK menurut pendapat masyarakat relatif mahal terdiri dari biaya untuk SPP, seragam, biaya praktek, biaya tersebut dirasa mahal di daerah Kecamatan Wonosalam dan Kudu yang merupakan wilayah masyarakat dengan perekonomian kebawah.

Kesalahan pemahamaan mengenai pengertian sesungguhnya dari konsep pendidikan berbasis keunggulan lokal membuat tidak kesesuiannya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang dengan program PBKL yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) merupakan program yang sangat strategis di dunia pendidikan guna menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola sumber kekayaan daerah secara mandiri dan hasil dari produksi keunggulan lokal tersebut menjadi pemasukan bagi perekonomian atau pendapatan asli daerah (PAD). Program pembelajaran Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang diselenggarakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi daerah yang bermanfaat bagi siswa dalam proses pengembangan kompetensi atau keahlian, maka dalam penyusunan program PBKL harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) Potensi Daerah, merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh satu daerah tertentu yang mampu memberikan nilai *benefit* (kemanfaatan) dan nilai efektif (kemudahan) bagi daerah itu sendiri.
- 2) Keunggulan Lokal, adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup sumber daya alam, dan ekologi yang tidak dimiliki atau tidak terdapat pada daerah yang lain.
- 3) Kebutuhan Daerah, merupakan segala sesuatu yang paling diperlukan dan menjadi prioritas oleh masyarakat di suatu daerah untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan pemahaman mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) seperti yang dijelaskan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mengembangakan suatu program kompetensi melalui sekolah terutama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk dapat menwujudkan kondisi yang ideal dalam pengembangan program PBKL di Kabupaten Jombang. Strategi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam pengembangan Program PBKL ini adalah:

1) Memperluas akses kebutuhan pendidikan keunggulan lokal bagi siswa SMK yang dilakukan dengan menyusun rencana program pengembangan komptensi keahlian pada SMK secara terpadu melalui penataan komptensi keahlian kebutuhan pasar kerja dunia usaha atau industri yang diikuti kegiatan Menyusun Kurikulum Berbasis Keunggulan Lokal dan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keunggulan Lokal.

- 2) Menjadikan kompetensi keahlian industri pengolahan keunggulan lokal sebagai muatan lokal pada SMK atau mengintegrasikan komptensi keahlian berbasis keunggulan lokal pada kompetensi keahlian SMK yang relevan. Dinas Pendidikan secara bertahap dapat melakukan seleksi penerimaan tenaga guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bidang sesuai prioritas kebutuhan untuk memenuhi kurangnya umlah guru produktif dan juga melakukan peningkatan kualitas kompetensi guru produktif yang telah ada melalui kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan.
- 3) Melakukan penambahan kompetensi keahlian industri pengolahan keunggulan lokal Kabupaten Jombang (padi, jagung, tebu, cengkeh, dan telur ayam buras) pada SMK rintisan berbasis keunggulan lokal yang telah diselenggarakan pada waktu yang sama secara bertahap dapat dilakukan pengadaan sarana prasarana praktek dan kelengakapan laboratorium melalui APBN/APBD dan lembaga luar pemerintahan (lembaga donor) yang peduli terhadap pendidikan yang didukung kebijakan pemberian beasiswa khususnya untuk pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- 4) Meningkatkan fungsi layanan pendidikan SMK berbasis keunggulan lokal dengan meningkatkan jalur jalan raya dan jalur transportasi pada waktu yang sama Pemerintah Daerah menetapkan rencana kebijakan

komoditas unggulan dari dan rencana pengembangan area secara bertahap dilakukan pengembangan pusat agribisnis dan pengembangan agroindustri.

Program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) dapat terlaksana dengan baik jika adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik pula dari pemerintah daerah yang berwenang untuk melaksanakan program ini. Pihak-pihak yang terlibat yaitu seperti dinas pendidikan, badan perencanaan dan pembangunan daerah, sekolah-sekolah yang menjadi rintisan program PBKL, lembaga luar pemerintah atau *stakeholder* di dunia pendidikan (kepala sekolah, guru, peserta didik), serta masyarakat. Dari hasil analisis keunggulan lokal di Kabupaten Jombang dan berbagai masalah yang terjadi dalam program PBKL di Kabupaten Jombang peran pemerintah daerah yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Untuk mendukung pengembangan program PBKL yang diharpakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan menyerap tenaga kerja lokal peran pemerintah daerah yaitu menentukan prioritas pengembangan komoditas unggulan lokal sebagai keunggulan lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Peran data komoditas unggulan yang menjadi basis ekonomi dan memiliki prospek dikembangkan tersebut diterbitkan dalam booklet dan

- diunggah pada situs *website* daerah yang diarahkan untuk mendukung pengembangan daerah di Kabupaten Jombang.
- 3) Untuk pengembangan program PBKL di Kabupaten Jombang sesuai peran dinas pendidikan dapat mengusulkan rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK terpadu yang diarahkan mendukung perkembangan komoditas unggulan yang menjadi basis ekonomi dan potensial untuk dikembangkan.
- 4) Untuk penentuan lokasi sekolah berbasis keunggulan lokal peran dinas pendidikan dapat melakukan koordinasi dengan Bappeda dalam menentukan lokasi sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai dengan fasilitas pendidikan pusat sentra produk komoditas unggulan.
- 5) Dalam mendukung terwujudnya pengembangan program PBKL peran dinas pendidikan adalah merencanakan kegiatan penyusunan kurikulum, penerimaan dan penataan guru sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan dan secara berkala melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas profesional guru.
- 6) Untuk mendukung pengembangan program PBKL peran masyarakat direncanakan kegiatan peningkatan wawasan tentang pentingnya sektor keunggulan lokal dalam memperkuat pembangunan ekonomi dan prospek mengembangkan industri untuk mengolah produk komoditas unggulan lokal yang dapat meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan wewenang pemerintah dan masyarakat di daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah diharapkan untuk mampu mengelola sumber daya keunggulan lokal yang ada didalam daerahnya sendiri guna mensejahterakaan masyarakat. Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar untuk pengembangan konsep keunggulan lokal melalui program pendidikan. Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) merupakan salah satu terobosan penting dalam dunia pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh setiap daerah di Indonesia. Melalui program PBKL diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian daerah serta dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan mampu untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh daeranya sendiri. Setiap daerah berhak untuk dapat mengelola keunggulan yang dimiliki di daerahnya.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang sedang mengembangakan program pendidikan keunggulan lokal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karakteristik potensi wilayah Kabupaten Jombang terdapat pada sektor pertanian, sub sektor bahan tanaman makan perkebunan dan peternakan. Melalui

hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dapat diketahui bahwa terdapat 5 komoditas yang menjadi keunggulan lokal yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Jombang dari hasil nilai LQ > 1 adalah:

- 1. Padi (1,12),
- 2. Jagung (1.18),
- 3. Tebu (1,31),
- 4. Cengkeh (1.97), dan
- 5. Telur ayam buras (1,57)

Namun, adanya ketidakpahaman pemerintah daerah Kabupaten Jombang mengenai konsep keunggulan lokal menimbulkan berbagai masalah dalam menerapkan program pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). Perencanaan daerah yang didasari oleh Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2016 Bab IX Pasal 18 Ayat 3 tentang penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa keunggulan lokal sebagaimana dimaksud adalah mata pelajaran keunggulan lokal keagamaan. Peraturan ini yang mendasari terbuatnya program kerja dari dinas pendidikan Kabupaten Jombang yang disebut program Jombang Agamis.

Program Jombang Agamis yang dicanangkan sebagai program PBKL oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang meliputi:

- 1. Baca tulis Al-Qur'an
- 2. Menghafal ayat-ayat Al-Qur'an

- 3. Menghafal doa sehari-hari
- 4. Kegiatan beragama dalam kehidupan bermasyarakat (tahlil, istighosah, dan mu'adzin, dll)

Program Jombang Agamis tersebut tidak sesuai dengan konsep PBKL yang sesungguhnya karena dalam penyusunan program PBKL harus mempertimbangkan 3 hal pokok yaitu aset daerah, keunggulan atau ciri khas daerah, serta kebutuhan daerah

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program poendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) di Kabupaten Jombang, maka strategi pengembangan program PBKL di Kabupaten Jombang harus dilakukan secara bertahap dimulai dari penetapan keunggulan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang, penentuan sekolah, penyusunan kurikulum berbasis keunggulan lokal, menjadikan keunggulan lokal sebagai muatan lokal pada sekolah-sekolah, peningkatan jumlah dan mutu guru yang sesuai dengan kualifikasi akademik, komoditas prioritas yang didukung luas tanam dan penambahan luas area tanam komoditas keunggulan lokal, dan pengembangan agribisnis dan agroindustri. Kemudian, untuk beberapa pihak terkait dapat melaksanakan kegiatan seperti berikut:

 Untuk Dinas Pendidikan, mengenai potensi dan masalah serta rencana pengembangan program PBKL di Kabupaten Jombang yang dapat dijadikan bahan pertimbangan menyusun kebijakan pengembangan program PBKL yang dapat dilaksanakan secara terpadu untuk mendorong peningkatan layanan akses Pendidikan berbasis keunggulan lokal yang bermutu dan berdaya saing. Sesuai dengan perannya, dinas pendidikan dapat mengusulkan rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) terpadu yang diarahkan guna mendukung perkembangan komoditas unggulan yang menjadi basis ekonomi dan potensial untuk dikembangkan.

- 2. Untuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dapat mengungkap potensi wilayah berdasarkan analisis ekonomi basis sehingga dapat diketahui komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki prospek untuk dikembangkan, karena hendaknya analisis mengenai keunggulan lokal dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pengembangan keunggulan lokal sebagai program prioritas daerah karena memiliki potensi untuk mendorong peningkatan dan/atau pertumbuhan perekonomian daerah, serta penyerapan tenaga kerja lokal, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
- 3. Untuk Masyarakat, hendaknya menyadari pentingnya mengelola, mengolah, meningkatkan nilai tambah pada potensi kunggulan lokal untuk memperkuat ketahan ekonomi rakyat, menurangi pengangguran dengan mendukung menjadikan program PBKL guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola dan mengolah potensi keunggulan lokal yang tersedia diseiktar tempat tinggal menjadi peluang usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardja. 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arwanda, Finda. 2015. *Identifikasi Indikator Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2/2015 (FISIP UNPAR)
- BAPPENAS. 2002. *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat.* Jakarta: Sekretariat Pengembangan Publik Good Governance-BAPPENAS.
- BPS. 2015. *Jawa Timur dalam Angka Tahun 2015*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistika
- BPS. 2015. Jombang dalam Angka Tahun 2015. Jombang: Badan Pusat Statistika
- BPS. 2016. *Jawa Timur dalam Angka Tahun 2016*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistika
- BPS. 2016. Jombang dalam Angka Tahun 2016. Jombang: Badan Pusat Statistika
- BPS. 2016. Statistik Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016. Jombang: Badan Pusat Statistika
- BPS. 2017. *Jawa Timur dalam Angka Tahun 2017*. Jawa Timur: Badan Pusat Statistika
- BPS. 2017. Jombang dalam Angka Tahun 2017. Jombang: Badan Pusat Statistika
- Dwitagama, Dedi. 2007. *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global*. Jakarta: LP3ES
- F. Knelled Ledi, George. 1967. Of Education. Publication.
- Hasbullah, M. 2015. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres
- https://jatim.bps.go.id diakses pada 2 Desember 2017
- https://jombangkab.bps.go.id diakses pada 2 Desember 2017
- Kabupaten Jombang. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan 2016. Jombang: Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

- Kabupaten Jombang. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2013-2018. Jombang: Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- Ma'mur Asmani, Jamal. 2012. *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal* Jogjakarta: DIVA Press.
- Matin. 2014. Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pres
- _____. 2015. Perencanaan Pendidikan Prespektif Proses dan Teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pres
- Miles, Huberman, dkk. 2104. Metode Penelitian. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 09 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Permendiknas no. 24 Tahun 2007 tentang Pendidikan Nasional, Jakarta: 2007.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sayefudin Sa'ud, Udin & Syamsuddin Makmun, Abin. 2011. *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Siagian, Sondang P. 2000. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya). Jakarta: Bumi Aksara
- Soekartawi. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan (dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah). Jakarta: Rajawali
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

______. 1987. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung.